**MENTERI PERTANIAN**
**REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 19/Permentan/OT.140/2/2010

TENTANG

PEDOMAN UMUM PROGRAM SWASEMBADA
DAGING SAPI 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan daging sapi dalam negeri perlu upaya pencapaian swasembada daging sapi;

b. bahwa untuk mencapai swasembada daging sapi sebagaimana dimaksud pada huruf a, diperlukan suatu program swasembada daging sapi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, dipandang perlu membentuk Pedoman Umum Program Swasembada Daging Sapi 2014, dengan Peraturan Menteri Pertanian;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3448);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3656);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), juncto Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5015);
6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Lahan Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5068);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977 tentang Usaha Peternakan (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3102);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4254);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
10. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
11. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, juncto Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005;
12. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 299/Kpts/OT.140/7/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian, jis Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/OT. 140/2/2007 dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 22/Permentan /OT.140/4/2008;
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 341/Kpts/OT.140/9/2005 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian, jucnto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12/Permentan/OT.140/2/2007;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pedoman Umum Program Swasembada Daging Sapi Tahun 2014, seperti tercantum pada Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

KEDUA : Pedoman umum sebagaimana dimaksud pada pada Diktum KESATU sebagai dasar dalam pelaksanaan program dan kegiatan swasembada daging sapi 2010 - 2014.

KETIGA : Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Peraturan Menteri Pertanian Nomor 59/Permentan/HK.060/8/2007 tentang Pedoman Percepatan Pencapaian Swasembada Daging Sapi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Pebruari 2010

MENTERI PERTANIAN,

TTD

SUSWONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 9 Pebruari 2010

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

TTD

PATRIALIS AKBAR

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR: 80

**LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN**
**NOMOR : 19/Permentan/OT.140/2/2010**
**TANGGAL : 5 Pebruari 2010**

# PEDOMAN UMUM PROGRAM SWASEMBADA DAGING SAPI TAHUN 2014

## BAB I
## PENDAHULUAN

Program Swasembada Daging Sapi Tahun 2014 (PSDS-2014) merupakan tekad bersama dan menjadi salah satu dari program utama Kementerian Pertanian yang terkait dengan upaya mewujudkan ketahanan pangan hewani asal ternak berbasis sumberdaya domestik khususnya ternak sapi potong. Swasembada daging sapi sudah lama didambakan oleh masyarakat agar ketergantungan terhadap impor baik sapi bakalan maupun daging semakin menurun dengan mengembangkan potensi dalam negeri.

Dengan berswasembada daging sapi tersebut akan diperoleh keuntungan dan nilai tambah yaitu : (1) meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan peternak; (2) penyerapan tambahan tenaga kerja baru; (3) penghematan devisa negara; (4) optimalisasi pemanfaatan potensi ternak sapi lokal*;* dan (5) semakin meningkatnya peyediaan daging sapi yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH) bagi masyarakat sehingga ketentraman lebih terjamin.

Keberhasilan program swasembada daging sapi 2014 akan sangat tergantung kepada partisipasi penuh masyarakat peternak sapi potong, sehingga bagaimanapun baiknya program yang disusun tidak akan berhasil tanpa partisipasi masyarakat peternak dan para pelaku peternakan sapi potong lainnya

Oleh karena itu, diperlukan pedoman umum PSDS 2014 agar para pengelola kebijakan sampai operasionalnya di lapangan mempunyai pegangan umum dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagaimana tercantum dalam cetak biru (*blue print)* PSDS 2014. Pedoman umum ini merupakan acuan penting bagi para pengelola kegiatan baik di tingkat Pusat maupun Provinsi dan Kabupaten/Kota sehingga diperoleh persamaan persepsi dalam melaksanakan berbagai kebijakan dan langkah-langkah operasionalnya.

Pedoman umum ini mencakup : (i) maksud dan tujuan; (ii) *road map;* (iii) kontribusi masing-masing kegiatan dalam penyediaan daging; (iv) kegiatan operasional; (v) rencana aksi; (vi) organisasi pelaksanaan; (vii) monitoring, evaluasi dan pelaporan; serta (viii) pembiayaan.

.

# BAB II
# MAKSUD, TUJUAN, DAN SASARAN

## A. Maksud

Maksud ditetapkannya pedoman ini adalah sebagai dasar dan acuan pelaksana kebijakan dan kegiatan di tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam melaksanakan PSDS 2014, yang dikoordinasikan oleh Departemen Pertanian dengan melibatkan beberapa departemen teknis lainnya, sehingga diperoleh persamaan persepsi tentang target dan sasaran yang harus dicapai oleh para pengelola kegiatan di tingkat Pusat, Propinsi, dan Kabupaten/kota.

## B. Tujuan

Tujuan penyusunan Pedoman Umum PSDS 2014 adalah :

1. Mengarahkan pelaksanaan kegiatan operasional yang lebih terfokus dan terpadu lintas sektoral.
2. Memberikan target dan tahapan pencapaian yang komprehensif sebagai indikator keberhasilan
3. Memantapkan koordinasi dan sinkronisasi di tingkat pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.

## C. Sasaran

1. Meningkatnya populasi sapi potong menjadi 14,2 juta ekor tahun 2014 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 12,48%.
2. Meningkatnya produksi daging dalam negeri sebesar 420,3 ribu ton pada tahun 2014 atau meningkat 10,4% setiap tahunnya.
3. Tercapaianya penurunan impor sapi dan daging sehingga hanya mencapai 10% dari kebutuhan konsumsi masyarakat.
4. Bertambahnya penyerapan tenaga kerja sebagai dampak dari pertambahan populasi dan produksi ternak sebesar 76 ribu orang/tahun.
5. Meningkatnya pendapatan peternak sapi potong minimal setara dengan UMR masing-masing propinsi

# BAB III
# RUANG LINGKUP

Pelaksanaan PSDS 2014 mencakup 4 aspek, yaitu aspek teknis, ekonomis, kelembagaan, kebijakan, dan lokasi yang dirinci sebagai berikut:

## A. Teknis

Ruang lingkup Program dari aspek teknis mencakup beberapa aspek, yaitu di bidang perbibitan, pakan, budidaya, kesehatan hewan, dan kesehatan masyarakat veteriner.

1. Bidang perbibitan
   a. Melakukan pemetaan wilayah-wilayah sumber bibit untuk mengetahui ketersediaan bibit ternak di suatu wilayah dan mengembangkan sistem perbibitan. Langkah-langkah ini ditujukan untuk meningkatkan mutu genetik sehingga *Average Daily Gain* menjadi lebih besar, mempercepat waktu penggemukan, memperbaiki efisiensi penggunaan pakan, serta meningkatkan persentase karkas dan kualitas daging
   b. Kegiatan di hulu, pembibitan sapi menghasilkan pejantan unggul untuk IB atau INKA, yang didukung sepenuhnya oleh Pemerintah.

2. Pakan
   a. Kegiatan perkembangbiakan atau *cow calf operation* (CCO) dilakukan secara ekstensif (*grazing*) atau secara intensif terintegrasi dengan agribisnis lainnya (*crop livestock system*, CLS). Kegiatan ini harus menerapkan prinsip *low external input sustainable agriculture* (LEISA), atau dengan pendekatan *zero waste* dan bila memungkinkan mendekati *zero cost*, sehingga menghasilkan produk 4-F (*food, feed, fertilizer & fuel*).
   b. Kegiatan penggemukan dilakukan dengan prinsip-prinsip agribisnis, efisiensi, dengan *high or medium external input*, serta berbasis pakan lokal dengan imbangan serat, energi dan protein yang ideal.

3. Bidang Budidaya
   a. Melakukan tunda potong sapi lokal atau hasil IB sehingga mencapai bobot potong maksimal sesuai potensi genetik dan potensi ekonominya, yang diperkirakan dapat meningkatkan produksi daging sekitar 20-30%.
   b. Meningkatkan produktivitas sapi lokal dan hasil IB sehingga meningkatkan jumlah sapi betina produktif, menekan nilai atau angka

*service per conception* (S/C), memperpendek *calving interval*, mempercepat umur beranak pertama, dan memperpanjang masa produktif (*longivity*), yang secara keseluruhan dapat meningkatkan *calf crop* sekitar 30-40%.

c. Tataniaga ternak hidup dan daging harus terkait erat dengan kegiatan budidaya, sehingga nilai tambah untuk peternak dan pedagang relatif lebih adil, seimbang atau proporsionil.

4. Bidang Kesehatan Hewan

   Menekan kematian pedet dari 20-40% menjadi 5 – 10% dan induk dari 10-20% menjadi 2 – 5%, di beberapa wilayah sumber bibit menjadi sekitar < 5-10 % (kematian pedet) dan < 2-5 % (kematian induk).

5. Bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner

   Mencegah pemotongan sapi betina produktif yang secara nasional masih sangat besar, yaitu sekitar 150-200 ribu ekor/tahun yang terjadi terutama di NTT, NTB, Bali, dan Jawa.

**B. Ekonomis**

1. Pengaturan distribusi dan pemasaran sapi dan daging sapi melalui pengaturan stock dalam negeri yang dikaitkan dengan kebutuhan dan tingkat konsumsi masyarakat.

2. Mengkaji supply dan demand ternak dalam negeri dikaitkan dengan impor ternak sapi dan daging dan menghidupkan kembali alokasi ternak bibit dan ternak potong dalam negeri setiap tahun.

**C. Kelembagaan**

1. Kegiatan untuk mewujudkan swasembada daging sapi 2014 harus didukung dengan kelembagaan yang tepat, yang terdiri dari: (i) ilmuwan, pakar dan penyuluh, (ii) pelaku usaha, baik yang berskala menengah dan kecil maupun skala besar, serta (iii) pemerintah di tingkat pusat maupun daerah yang bertindak sebagai regulator, fasilitator, motivator dan dinamisator. Keberadaan kelompok peternak atau koperasi menjadi suatu keharusan, dan kerjasama kemitraan antara pihak-pihak terkait perlu diperluas.

2. Keberhasilan beberapa kelompok peternak atau koperasi di beberapa daerah membuktikan bahwa program yang sederhana dan mudah dipahami pengemban kepentingan atau pelaku usaha menjadi syarat mutlak. Program yang sederhana tersebut harus disosialisasikan dengan sungguh-sungguh,

diimplementasikan secara konsekuen, dengan menerapkan prinsip-prinsip *good governance*, yaitu: transparan, jujur, adil, dan konsisten, serta dengan menegakkan *law enforcement*, dan *reward & punishment*.

## D. Kebijakan

Sektor pertanian, termasuk di dalamnya usaha agribisnis peternakan, hanya akan berkembang dan maju bila didukung dengan kebijakan yang kondusif.

1. Pada kegiatan hulu harus dapat menjamin ketersediaan input produksi secara mudah, murah dan berkelanjutan. Dukungan Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS) harus benar-benar dioptimalkan dan terus dikembangkan.
2. Kredit murah untuk kegiatan penggemukan juga sangat diperlukan agar tunda potong dapat diwujudkan dengan baik.
3. Ekspor bahan pakan, seperti bungkil inti sawit (BIS), tetes, wafer (pucuk tebu), onggok/gaplek, dlsb., harus dibatasi atau bahkan dilarang bila keperluan di dalam negeri belum tercukupi.
4. Kebijakan dalam hal budidaya (*on farm*) yang dapat memberi kepastian usaha, terkait dengan tata ruang, pola integrasi tanaman-ternak, dlsb.
5. Kebijakan dalam hal harga dan perdagangan harus dapat memberi kepastian kepada pelaku usaha agar harga daging tetap atraktif namun masih terjangkau. Praktek monopoli atau kartel, impor produk tidak berkualitas dengan cara *dumping*, memasukkan daging illegal, dsb., harus benar-benar dapat dicegah. Perlindungan bagi peternak kecil dan pelaku usaha pada umumnya dalam kontek perdagangan internasional dapat memanfaatkan instrumen tariff maupun non-tariff seperti Kuota, ASUH, dan SPS.

## E. Lokasi

Operasionalisasi kegiatan PSDS 2014 pada dasarnya dilakukan di seluruh propinsi oleh karena dampak penting dari program swasembada daging sapi ini akan dinikmati seluruh propinsi, tergantung dari masing-masing kegiatan pokok dan kegiatan operasional yang akan dilakukan disesuaikan dengan potensi wilayah yang bersangkutan.

# BAB IV
# PRINSIP-PRINSIP SWASEMBADA DAGING SAPI 2014

## A. Umum

1. Pemberdayaan peternak dan ternak sapi potong dalam negeri untuk meningkatkan performance ternak dalam negeri yang masih rendah ke arah performance yang sebenarnya.
2. Peningkatan sumber daya manusia baik, aparat maupun peternak untuk meningkatkan kompetensi dan kapabilitasnya.
3. Pengembangan teknologi tepat guna baik di bidang perbibitan, pakan, budidaya, keswan dan kesmavet.
4. Pengembangan kelembagaan peternak sehingga peternak memiliki daya tawar yang kuat.
5. Pembangunan infrastruktur, baik di hulu, onfarm dan di hilir sehingga tercapai prinsip *from the farm to table.*
6. Pendataan ternak dilakukan melibatkan lembaga yang berkompeten (BPS) sehingga berlaku parameter ternak yang *up to date*
7. Melakukan pendanaan yang memadai untuk tercapainya swasembada daging sapi termasuk pemberian subsidi dan insentif pada bidang-bidang tertentu yang memiliki resiko tinggi.

## B. Khusus (keprograman)

1. Kegiatan Operasional ditangani oleh unit fungsional yang memiliki otoritas dalam implementasi kebijakan dan dikelola oleh Unit Organisasi khusus yang dibentuk oleh Mentan.
2. Program PSDS dilaksanakan secara terfokus dan sinergis dengan melibatkan instansi lain.
3. Komitment Pusat, Propinsi, Kabupaten/Kota dan Instansi terkait dalam pelaksanaan program
4. Adanya dukungan pendanaan yang memadai dalam operasionalisasi program.

# BAB V
# ROAD MAP PSDS 2014

## A. Pilihan Berbagai Skenario

1. Dalam rangka swasembada daging sapi 2014 maka beberapa skenario telah disusun yang bersifat *pesimistic* sampai dengan *optimistic*. Diantara dua skenario tersebut terdapat skenario lainnya yaitu skenario *most likely*. Ketiga skenario tersebut didasarkan kepada skenario produksi domestik dan impor, baik sapi bakalan maupun daging. Untuk itu diperlukan berbagai strategi pencapaian tergantung dari skenario yang akan dilakukan. Produksi Domestik akan sangat dipengaruhi oleh keadaan stok dalam negeri yang ditentukan dari angka kelahiran, angka kematian, dan mutasi ternak yang sangat ditentukan pula oleh mutu genetisnya. Skenario tersebut secara umum dapat digambarkan pada Tabel 1 berikut ini.

   Tabel 1 Road Map Skenario *Pesimistic, Most Likely* dan *Optimistic.*

| Road Map Skenario | Produksi Domestik (%) | | | Impor (%) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | *Pesimistic* | *Most Likely* | *Optimistic* | *Pesimistic* | *Most Likely* | *Optimistic* |
| Tahun 2009 | 63.5 | 63.5 | 63.5 | 36.5 | 36.5 | 36.5 |
| Tahun 2010 | 52.1 | 70.2 | 78.9 | 47.9 | 29.8 | 21.1 |
| Tahun 2011 | 50.8 | 75.5 | 85.9 | 49.2 | 24.5 | 14.1 |
| Tahun 2012 | 49.6 | 80.5 | 92.9 | 50.4 | 19.5 | 7.1 |
| Tahun 2013 | 48.6 | 85.3 | 100.9 | 51.4 | 14.7 | (0.9) |
| Tahun 2014 | 47.6 | 90 | 110 | 52.4 | 10 | (10) |

2. Dari Tabel 1 tersebut nampak bahwa untuk skenario *pesimistic* tanpa upaya-upaya terobosan (kegiatan reguler) produksi domestik akan mengalami penurunan sampai dengan 47,6%, sehingga akan membuat ketergantungan impor semakin meningkat. Sedangkan untuk skenario *most likely* 90% kebutuhan konsumsi dapat dipenuhi dari produksi domestik dan sisanya 10 % dipenuhi melalui impor. Untuk skenario *optimistic* apabila kita mampu (kurun waktu lima tahun) mencapai target melebihi tingkat konsumsi masyarakat sehingga memiliki peluang untuk ekspor (produksi surplus). Dari analisa tersebut maka untuk skenario *optimistic* pada tahun 2013 kita sudah memiliki peluang untuk ekspor. Tetapi ketiga skenario ini memerlukan langkah-langkah dan strategi yang sesuai didukung oleh kemampuan genetis ternak dalam negeri serta sumber daya yang mendukungnya

## B. Skenario yang Realistis

1. Setelah melalui berbagai pertimbangan yang cukup matang maka skenario *most likely* telah dipilih sebagai target dan sasaran utama PSDS 2014.

Pertimbangan penting dipilihnya skenario *most likely* adalah ketersediaan sumber daya manusia dan infrastruktur yang masih dapat dikembangkan dengan sumber dana yang memungkinkan. Selain itu, ternak lokal yang ada masih dapat ditingkatkan populasi, produksi, produktivitas dan reproduktivitasnya, sehingga gambaran dari skenario yang dipilih dari aspek teknis adalah seperti dalam Tabel 2 berikut.

Tabel 2 Road Map Skenario Populasi, Produksi, dan Konsumsi

| Road Map Skenario | Produksi domestik | Impor |
|---|---|---|
| Tahun 2009 | | |
| Populasi (000 ekor) | 12,610.10 | 580.00 |
| (…..ribu ton) | | 72.80 |
| Produksi (000 ton) | 250.80 | 70.00 |
| Konsumsi (000 ton) | 250.80 | 142.80 |
| | | |
| Tahun 2010 | | |
| Populasi (000 ekor) | 12,794.90 | 260.00 |
| (…..ribu ton) | | 46.44 |
| Produksi (000 ton) | 282.90 | 73.76 |
| Konsumsi (000 ton) | 282.90 | 120.20 |
| | | |
| Tahun 2011 | | |
| Populasi (000 ekor) | 13,169.50 | 196.90 |
| (…..ribu ton) | | 35.29 |
| Produksi (000 ton) | 316.10 | 67.21 |
| Konsumsi (000 ton) | 316.10 | 102.50 |
| | | |
| Tahun 2012 | | |
| Populasi (000 ekor) | 13,521.60 | 149.00 |
| (…..ribu ton) | | 27.27 |
| Produksi (000 ton) | 349.70 | 57.43 |
| Konsumsi (000 ton) | 349.70 | 84.70 |
| | | |
| Tahun 2013 | | |
| Populasi (000 ekor) | 13,870.50 | 112.80 |
| (…..ribu ton) | | 20.34 |
| Produksi (000 ton) | 384.20 | 45.96 |
| Konsumsi (000 ton) | 384.20 | 66.30 |
| | | |
| Tahun 2014 | | |
| Populasi (000 ekor) | 14,231.70 | 85.40 |
| (…..ribu ton) | | 15.38 |
| Produksi (000 ton) | 420.40 | 31.22 |
| Konsumsi (000 ton) | 420.40 | 46.60 |

Keterangan : (....) populasi setara produksi daging

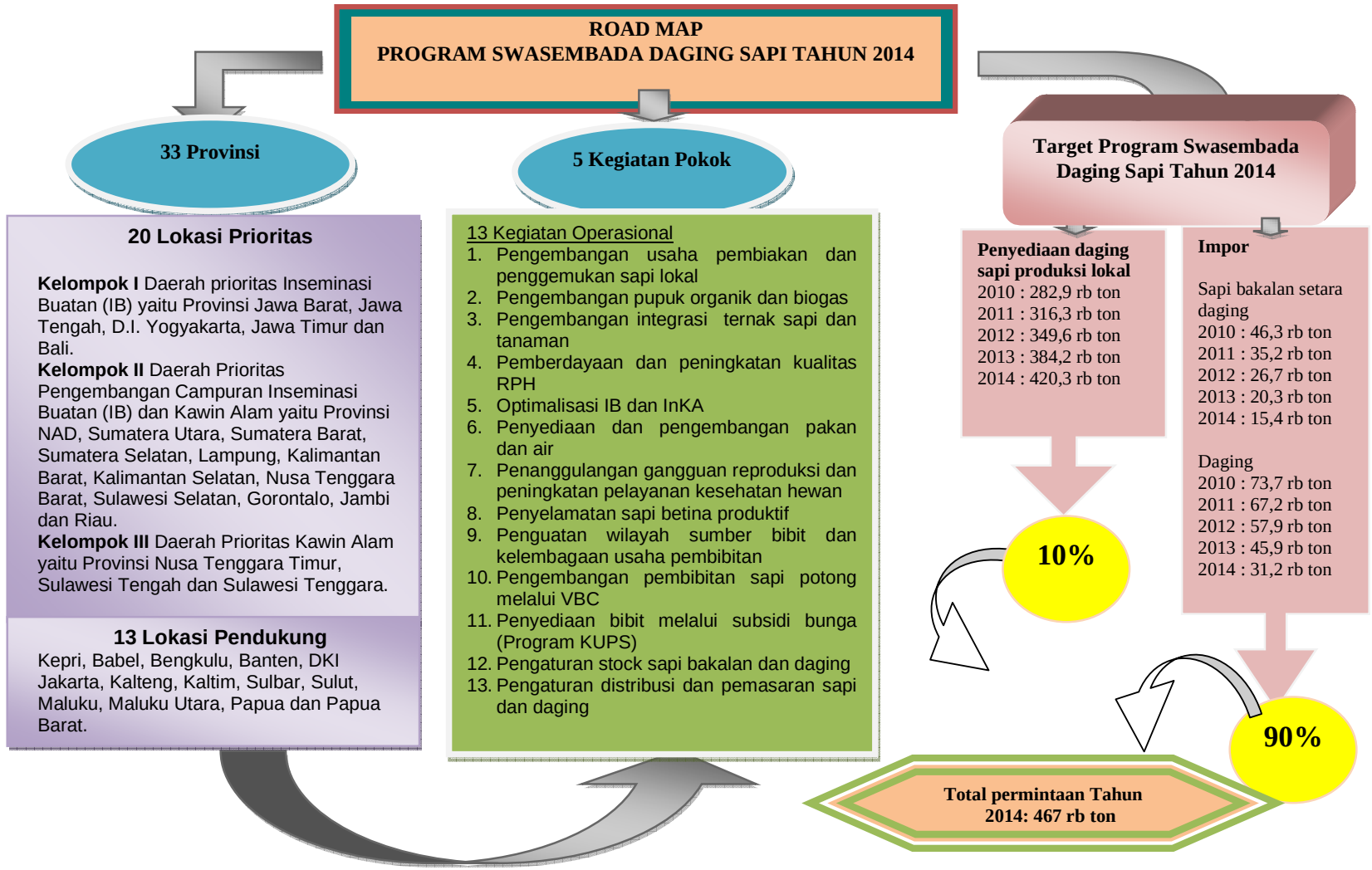
2. Dari tabel tersebut di atas agar tercapai swasembada daging sapi maka diperlukan populasi sapi domestik pada tahun 2014 sebesar 14,2 juta ekor, sehingga akan terdapat tambahan impor sapi bakalan sebanyak 85,40 ekor setara dengan daging sebesar 15,4 ribu ton dan daging 31,2 ribu ton. Pilihan skenario ini mensyaratkan adanya peningkatan angka kelahiran ternak, pemendekan calving interval, impor bibit, IB, INKA, peningkatan berat karkas IB dan INKA, peningkatan intensitas penanganan gangguan reproduksi, penyelamatan betina produktif dan penanganan gangguan penyakit hewan, serta penurunan angka kematian ternak. Secara rinci, parameter yang harus dicapai pada skenario yang telah dipilih adalah seperti pasa Tabel 3.

Tabel 3 Strategi pada Berbagai Skenario.

| | Uraian | SKENARIO | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Pesimistic | Most Likely | Optimistic |
| STRATEGI | Kelahiran (%) | 20.0 | 23.6 | 28.5 |
| | Kematian (%) | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
| | Calving Interval (bln) | 21.0 | 17.5 | 15.0 |
| | Impor bibit (e) | 5,000.0 | 5,000.0 | 50,000.0 |
| | Kelahiran IB ( 000e) | 886.4 | 1,599.5 | 1,599.5 |
| | Kelahiran INKA (000 e) | 1,003.8 | 1,179.7 | 1,562.2 |
| | Berat karkas INKA (e/kg) | 114.6 | 139.1 | 164.5 |
| | Berat karkas IB (e/kg) | 222.2 | 226.0 | 240.9 |
| | Gangguan reproduksi (000e) | 100.0 | 200.0 | 400.0 |
| | Penyelamatan Betina Produktif (000e) | | 150.0 | 250.0 |
| | Penanggulangan penyakit (000e) | 1,100.0 | 1,200.0 | 1,400.0 |
| | Regulasi | Pengaturan bibit, Pengaturan tata niaga dan importasi ternak | Pengaturan bibit, Pengaturan tata niaga dan importasi ternak | Pengaturan bibit ternak, Pengaturan tata niaga dan importasi ternak |

3. Pada skenario ini langkah yang digunakan untuk mencapai sasaran adalah berbagai langkah strategis yang tercakup dalam kegiatan-kegiatan pokok swasembada daging sapi. Kegiatan pokok tersebut adalah penyediaan bakalan/daging sapi lokal; peningkatan produktivitas dan reproduksi ternak sapi lokal; pencegahan pemotongan betina produktif; penyediaan bibit sapi; dan pengaturan stock daging sapi dalam negeri beserta 13 langkah operasionalnya. Melalui 13 (tiga belas) langkah operasional tersebut diharapkan dapat dicapai peningkatan berat badan hidup sapi siap potong hingga 800 kg, peningkatan berat lahir anak sapi, baik melalui IB dan kawin alam sehingga berat karkas mencapai 226 kg (hasil IB) dan 139 kg (hasil KA). Untuk ini diperlukan intervensi pemerintah dalam bentuk pemberian insentif khusus kepada para peternak sehingga peternak mampu dan mau melaksanakan pembesaran dan penggemukan sapi potong. Selain itu upaya untuk menunda pemotongan sapi betina produktif pada berbagai RPH terpilih dengan sistem insentif dan kompensasi sehingga peternak dapat kembali berusaha beternak sapi betina produktif dan menghasilkan keturunan. Secara sederhana *road map* PSDS 2014 disajikan pada Gambar 1.

Gambar 1. Road Map Program Swasembada Daging Sapi Tahun 2014



# BAB VI
# KONTRIBUSI KEGIATAN TERHADAP PENINGKATAN POPULASI DAN PRODUKSI DAGING

A. Kontribusi terhadap penambahan populasi

1. Kegiatan-kegiatan yang berkontribusi terhadap penambahan populasi ternak adalah kegiatan optimalisasi akseptor IB dan intensifikasi kawin alam. Selain kegiatan tersebut terdapat kegiatan SMD, pola integrasi tanaman ternak, kawasan pola padang penggembalaan, Pembibitan Pola *Insitu* dan *exsitu* dan penambahan jumlah bibit sapi.

2. Dari kegiatan-kegiatan yang menambah populasi tersebut optimalisasi akseptor IB dan INKA memiliki kontribusi terbesar sedangkan kegiatan-kegiatan yang lain merupakan kegiatan untuk menambah populasi ternak tetapi tidak sebesar bobot optimalisasi akseptor IB dan intensifikasi kawin alam. Berdasarkan pembobotan tersebut setelah dilakukan *pair wise comparison* maka diperoleh kontribusi penambahan populasi baik secara nasional maupun propinsi sebagaimana digambarkan pada table 4.

B. Kontribusi terhadap penambahan produksi daging.

Kegiatan-kegiatan operasional yang berkontribusi terhadap penambahan produksi daging adalah kegiatan pengembangan usaha pembiakan dan penggemukan sapi lokal, pengembangan pupuk organik dan biogas, pemberdayaan dan peningkatan kualitas RPH, optimalisasi IB dan INKA, penyediaan dan pengembangan pakan dan air, penaggulangan gangguan reproduksi dan peningkatan pelayanan kesehatan hewan, penyelamatan sapi betina produktif, penguatan wilayah sumber bibit dan kelembagaan usaha perbibitan, pengembangan pembibitan sapi potong melalui VBC, penyediaan bibit melalui subsidi bunga (KUPS), pengaturan stock sapi bakalan dan daging sapi, pengaturan distribusi dan pemasaran sapi dan daging di dalam negeri. Kontribusi penambahan produksi daging dari setiap propinsi terlihat pada tabel 5.

Tabel 4 Kontribusi Propinsi Terhadap Peningkatan Populasi

| No | Provinsi | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| 1 | NAD | 34,123 | 41,048 | 47,982 | 55,149 | 62,762 |
| 2 | Sumut | 20,664 | 24,859 | 29,058 | 33,398 | 38,008 |
| 3 | Sumbar | 25,009 | 30,084 | 35,166 | 40,419 | 45,999 |
| 4 | Riau | 8,580 | 10,322 | 12,065 | 13,867 | 15,781 |
| 5 | Jambi | 7,933 | 9,543 | 11,155 | 12,821 | 14,591 |
| 6 | Sumsel | 17,900 | 21,533 | 25,170 | 28,929 | 32,923 |
| 7 | Bengkulu | 4,962 | 5,969 | 6,977 | 8,019 | 9,126 |
| 8 | Lampung | 22,649 | 27,246 | 31,848 | 36,605 | 41,659 |
| 9 | DKI Jakarta | - | - | - | - | - |
| 10 | Jabar | 8,956 | 10,774 | 12,594 | 14,475 | 16,473 |
| 11 | Jateng | 43,697 | 52,566 | 61,445 | 70,623 | 80,373 |
| 12 | DI Yogyakarta | 8,179 | 9,840 | 11,502 | 13,220 | 15,045 |
| 13 | Jatim | 102,571 | 123,389 | 144,232 | 165,775 | 188,660 |
| 14 | Bali | 20,244 | 24,353 | 28,466 | 32,718 | 37,235 |
| 15 | NTB | 29,067 | 34,967 | 40,873 | 46,978 | 53,464 |
| 16 | NTT | 43,668 | 52,532 | 61,405 | 70,577 | 80,320 |
| 17 | Kalbar | 8,945 | 10,760 | 12,578 | 14,456 | 16,452 |
| 18 | Kalteng | 3,681 | 4,428 | 5,176 | 5,949 | 6,770 |
| 19 | Kalsel | 11,211 | 13,487 | 15,765 | 18,119 | 20,621 |
| 20 | Kaltim | 6,856 | 8,247 | 9,640 | 11,080 | 12,609 |
| 21 | Sulut | 8,249 | 9,924 | 11,600 | 13,333 | 15,173 |
| 22 | Sulteng | 15,526 | 18,678 | 21,833 | 25,093 | 28,558 |
| 23 | Sulsel | 37,434 | 45,032 | 52,638 | 60,500 | 68,853 |
| 24 | Sultra | 18,075 | 21,743 | 25,416 | 29,212 | 33,245 |
| 25 | Maluku | 5,685 | 6,839 | 7,994 | 9,188 | 10,456 |
| 26 | Papua | 4,269 | 5,136 | 6,003 | 6,900 | 7,852 |
| 27 | Babel | 714 | 859 | 1,004 | 1,154 | 1,313 |
| 28 | Banten | 3,230 | 3,885 | 4,542 | 5,220 | 5,941 |
| 29 | Gorontalo | 12,119 | 14,579 | 17,041 | 19,587 | 22,291 |
| 30 | Malut | 3,921 | 4,716 | 5,513 | 6,336 | 7,211 |
| 31 | Kepri | 601 | 723 | 845 | 971 | 1,106 |
| 32 | Papua Barat | 2,688 | 3,233 | 3,780 | 4,344 | 4,944 |
| 33 | Sulbar | 7,476 | 8,994 | 10,513 | 12,083 | 13,752 |
| | **Jumlah** | **548,880** | **660,285** | **771,817** | **887,098** | **1,009,565** |

Tabel 5 Kontribusi Propinsi Terhadap Peningkatan Produksi Daging

| No | Provinsi | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| 1 | NAD | 4,539 | 6,432 | 8,334 | 10,284 | 12,315 |
| 2 | Sumut | 2,749 | 3,895 | 5,047 | 6,228 | 7,458 |
| 3 | Sumbar | 3,327 | 4,714 | 6,108 | 7,537 | 9,026 |
| 4 | Riau | 1,141 | 1,617 | 2,096 | 2,586 | 3,097 |
| 5 | Jambi | 1,055 | 1,495 | 1,938 | 2,391 | 2,863 |
| 6 | Sumsel | 2,381 | 3,374 | 4,372 | 5,395 | 6,460 |
| 7 | Bengkulu | 660 | 935 | 1,212 | 1,495 | 1,791 |
| 8 | Lampung | 3,013 | 4,269 | 5,532 | 6,826 | 8,174 |
| 9 | DKI Jakarta | - | - | - | - | - |
| 10 | Jabar | 1,191 | 1,688 | 2,188 | 2,699 | 3,232 |
| 11 | Jateng | 5,813 | 8,237 | 10,673 | 13,170 | 15,771 |
| 12 | DI Yogyakarta | 1,088 | 1,542 | 1,998 | 2,465 | 2,952 |
| 13 | Jatim | 13,645 | 19,334 | 25,053 | 30,914 | 37,019 |
| 14 | Bali | 2,693 | 3,816 | 4,945 | 6,101 | 7,306 |
| 15 | NTB | 3,867 | 5,479 | 7,100 | 8,761 | 10,491 |
| 16 | NTT | 5,809 | 8,231 | 10,666 | 13,161 | 15,760 |
| 17 | Kalbar | 1,190 | 1,686 | 2,185 | 2,696 | 3,228 |
| 18 | Kalteng | 490 | 694 | 899 | 1,109 | 1,328 |
| 19 | Kalsel | 1,491 | 2,113 | 2,738 | 3,379 | 4,046 |
| 20 | Kaltim | 912 | 1,292 | 1,674 | 2,066 | 2,474 |
| 21 | Sulut | 1,097 | 1,555 | 2,015 | 2,486 | 2,977 |
| 22 | Sulteng | 2,066 | 2,927 | 3,792 | 4,679 | 5,604 |
| 23 | Sulsel | 4,980 | 7,056 | 9,143 | 11,282 | 13,510 |
| 24 | Sultra | 2,405 | 3,407 | 4,415 | 5,447 | 6,523 |
| 25 | Maluku | 756 | 1,072 | 1,389 | 1,713 | 2,052 |
| 26 | Papua | 568 | 805 | 1,043 | 1,287 | 1,541 |
| 27 | Babel | 95 | 135 | 174 | 215 | 258 |
| 28 | Banten | 430 | 609 | 789 | 973 | 1,166 |
| 29 | Gorontalo | 1,612 | 2,284 | 2,960 | 3,652 | 4,374 |
| 30 | Malut | 522 | 739 | 958 | 1,182 | 1,415 |
| 31 | Kepri | 80 | 113 | 147 | 181 | 217 |
| 32 | Papua Barat | 358 | 507 | 657 | 810 | 970 |
| 33 | Sulbar | 995 | 1,409 | 1,826 | 2,253 | 2,698 |
| | **Jumlah** | **73,019** | **103,463** | **134,064** | **165,425** | **198,096** |

C. Kontribusi masing-masing Kegiatan

1. Setiap daerah atau propinsi memiliki karakteristik tersendiri tergantung kegiatan-kegiatan yang dipilih. Namun secara umum kegiatan-kegiatan yang menjadi inti dari program swasembada daging sapi adalah optimalisasi IB dan Kawin Alam, penambahan bibit melalui program-program SMD, KUPS, pengembangan pembibitan melalui VBC, dan pengembangan integrasi dalam arti menambah populasi, sedangkan untuk meningkatkan produksi adalah kegiatan lainnya yaitu : pengembangan pupuk organik dan biogas, pemberdayaan dan peningkatan kualitas RPH, penyediaan

dan pengembangan pakan dan air, penanggulangan gangguan reproduksi dan pelayanan keswan, serta penyelamatan sapi betina produktif.

Adapun kontribusi masing-masing kegiatan terhadap peningkatan produksi daging sapi dapat digambarkan pada Tabel 6.

Tabel 6. Rekapitulasi Kontribusi Kegiatan Operasional Terhadap Peningkatan Produksi Daging Sapi.

| No | Kegiatan Operasional | Peningkatan Produksi Daging ( ton) | | | | | Pelaksana | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Penanggung Jawab | Unit Kerja Terkait |
| 1 | Pengembangan usaha pembiakan dan pengemukan sapi lokal | 7,302 | 10,346 | 13,406 | 16,543 | 19,810 | Ditjen Nak | Kemen sos, Kemen Kop dan UKM, Kemen PDT, Kemennakertrans, Kemen BUMN |
| 2 | Pengembangan pupuk organik dan biogas | 3,651 | 5,173 | 6,703 | 8,271 | 9,905 | PLA | Ditjen Nak, ESDM, LIPI, Kemenristek, Balitbangtan |
| 3 | Pengembangan integrasi ternak sapi dan tanaman | 3,651 | 5,173 | 6,703 | 8,271 | 9,905 | Ditjen Nak | Kemen Hut, Kemen PU, Kemen BUMN, Ditjen Bun, Dirjen TP, Ditjen Hortikultura |
| 4 | Pemberdayaan dan peningkatan kualitas RPH | 2,191 | 3,104 | 4,021.9 | 4,963 | 5,942.9 | Ditjen Nak | Depdag, P2HP, Pemda |
| 5 | Optimalisasi IB dan INKA | 25,557 | 36,212 | 46,922 | 57,899 | 69,334 | Ditjen Nak | Pemda, BPSDSMP |
| 6 | Penyediaan dan pengembangan pakan dan air | 3,651 | 5,173 | 6,703 | 8,271 | 9,905 | PLA | Ditjen Nak, Dephut, Ditjen Bun |
| 7 | Penanggulangan gangguan reproduksi dan peningkatan pelayanan kesehatan hewan | 3,651 | 5,173 | 6,703 | 8,271 | 9,905 | Ditjen Nak | Badan Karantina, Pemda, UPT Peternakan |
| 8 | Penguatan wilayah sumber bibit dan kelembagaan usaha pembibitan | 2,191 | 3,104 | 4,022 | 4,963 | 5,943 | Ditjen Nak | Pemda, Kemen dagri, UPT Peternakan |
| 9 | Penyelamatan Sapi Betina Produktif | 7,302 | 10,346 | 13,406 | 16,543 | 19,810 | Ditjen Nak | Pemda, Kemendagri, Kepolisian |
| 10 | Pengembangan pembibitan sapi potong melalui VBC | 5,842 | 8,277 | 10,725 | 13,234 | 15,848 | Ditjen Nak | Pemda, Kemen Ristek, LIPI |
| 11 | Penyediaan bibit melalui subsidi bunga (Program KUPS) | 2,921 | 4,139 | 5,363 | 6,617 | 7,924 | Setjen | Ditjen Nak, Depkeu, Perbankan |
| 12 | Pengaturan stock sapi bakalan dan daging sapi | 2,921 | 4,139 | 5,363 | 6,617 | 7,924 | Ditjen Nak | Kemen dag, Karantina, |
| 13 | Pengaturan distribusi dan pemasaran ternak sapi dan daging di dalam negeri | 1,460 | 2,069 | 2,681 | 3,309 | 3,962 | Ditjen Nak | Kemen dag, Karantina |
| | Operasional kegiatan pusat/prop/ kab/kota/kec | 730 | 1,035 | 1,341 | 1,654 | 1,981 | Ditjen Nak | Pemda, Provinsi/kab/kota/kec |
| Total | | 73,019 | 103,463 | 134,064 | 165,425 | 198,096 | | |

# BAB VII
# STRATEGI PENCAPAIAN SASARAN

Strategi untuk mencapai sasaran swasembada daging sapi 2014 adalah strategi yang megutamakan keterpaduan antara pendekatan teknis, ekonomis, kelembagaan, pembiayaan dan regulasi. Masing-masing pendekatan ini tidak berdiri sendiri melainkan saling ketergantungan sehingga menimbulkan efek sinergi.

## A. Teknis

Pendekatan teknis adalah strategi yang terkait dengan aspek perbibitan, budidaya, kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner dan pakan. Pendekatan ini akan terkait dengan langkah operasional teknis yang secara rinci diuraikan ke dalam masing-masing pedoman teknis.

## B. Ekonomis

Pendekatan ekonomis adalah strategi yang diarahkan untuk secara umum mengatur, stock ternak yang ada sehingga stock meningkat mengarah kepada kemampuan domestik sebesar 90% dari kebutuhan konsumsi daging masyarakat. Pada pendekatan ini dilakukan pengaturan stock dan impor melalui instansi yang berwenang sehingga supply tetap terjamin. Melalui strategi ini akan dapat dihitung juga pengaruhnya terhadap pendapatan peternak terutama adanya dampak impor terhadap harga dalam negeri.

## C. SDM dan Kelembagaan

Pendekatan ini merupakan pendekatan untuk melengkapi SDM dan kelembagaan sesuai dengan kebutuhan. Dalam melengkapi SDM dan kelembagaan tersebut dapat terjadi proses revitalisasi kelembagaan, dalam arti peningkatan kapasitas dan kompetensi para pelaku dan kelembagaannya.

## D. Pembiayaan

Pendekatan pembiayaan ini dipilih karena terdapat tugas-tugas dan wewenang yang harus dijalankan oleh pemerintah dan oleh masyarakat. Pada prinsipnya pendanaan pemerintah digunakan sebagai *leverage* untuk menumbuhkan pembiayaan yang berasal dari swasta dan masyarakat. Faktor *leverage* tersebut terutama untuk perbibitan dan penanganan kesehatan hewan serta kesehatan masyarakat veteriner. Karena sifat program yang bersifat mendesak maka kebutuhan pembiayaan sebagian besar akan ditanggung oleh pemerintah dan pemerintah daerah.

## E. Regulasi

Strategi regulasi ini untuk melengkapi pilihan-pilihan strategi lainnya. Domain regulasi lebih banyak berada pada pemerintah pusat ataupun daerah. Apabila diperlukan dapat dilakukan regulasi baru atau deregulasi ataupun penghapusan regulasi yang berlaku selama ini dalam rangka memenuhi tuntutan perkembangan keadaan.

# BAB VIII
# KEGIATAN OPERASIONAL

## A. Penyediaan Bakalan/Daging Sapi Lokal

### 1. Pengembangan usaha pembiakan dan penggemukan sapi lokal

Kegiatan ini ditargetkan untuk meningkatkan populasi ternak sapi dan produksi daging, melalui pelaksanaan kegiatan operasional sebagai berikut :

a. Pengembangan usaha pembiakan dan penggemukan atau tunda potong sapi lokal dan sapi persilangan (IB) melalui penguatan modal usaha kelompok peternak, dengan cara memberikan fasilitas kredit murah maupun pemberian modal abadi (dalam bentuk bantuan sosial) dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, atau pemerintah daerah kepada kelompok peternak yang dipilih berdasarkan kriteria tertentu.

b. Peningkatan usaha agribisnis sapi potong untuk usaha pembiakan dan penggemukan sekaligus mempercepat peningkatan populasi ternak melalui Sarjana Membangun Desa (SMD), dengan cara pemberian kredit murah jangka panjang dan atau modal abadi (dalam bentuk bantuan sosial) dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, atau pemerintah daerah kepada kelompok peternak yang dimotori oleh peternak berpendidikan minimal sarjana/D3 Peternakan/Keswan yang dipilih berdasarkan kriteria tertentu.

### 2. Pengembangan pupuk organik dan biogas

Dalam rangka meningkatkan pengembangan usaha pembiakan dan penggemukan sapi lokal dan/atau sapi persilangan (IB) melalui pola *Kereman,* kegiatan ini ditargetkan untuk menghasilkan pupuk organik dan biogas melalui kegiatan operasional sebagai berikut :

a. Pengembangan pupuk organik dan jaringan pemasaran, dengan cara:

1) Pemberian bantuan dana untuk membangun rumah kompos (bangunan penyimpan kotoran ternak untuk diproses lebih lanjut) beserta semua perangkatnya di kelompok beserta untuk pengadaan ternak.

2) Pemberian pelatihan manajemen dan organisasi bagi kelompok peternak pengelola rumah kompos, beserta pelatihan usaha agribisnis sapi potong berbasis sumberdaya lokal.
3) Fasilitasi promosi dan pengembangan jaringan pemasaran kompos dan tata-niaga ternak.

b. Pembangunan instalasi biogas untuk penyediaan energi alternatif di pedesaan, dengan cara:
1) Pemberian bantuan dana untuk membangun instalasi biogas beserta seluruh perangkat penunjangnya di kelompok peternak yang populasinya memiliki jumlah minimal tertentu dan secara fisik lokasi kandangnya berkelompok.
2) Pemberian pelatihan dalam pemanfaatan biogas secara optimal bagi anggota kelompok peternak.

**3. Pengembangan integrasi ternak sapi dan tanaman**

Kegiatan pengembangan integrasi tanaman-ternak ditargetkan untuk memberikan nilai tambah bagi pengembangan usaha budidaya tanaman, sekaligus dengan meningkatkan jumlah populasi ternak sapi melalui kegiatan operasional sebagai berikut :

a. Integrasi tanaman-ternak untuk usaha budidaya sapi di lahan perkebunan, lahan tanaman pangan, lahan hortikultura, dan lahan kehutanan, dengan cara:
1) Koordinasi dengan perusahaan yang berperan sebagai inti, antara lain PTP/Perusda/swasta perkebunan/kehutanan atau pertambangan
2) Pemberian kredit murah jangka panjang dan atau modal abadi dari pemerintah, pemerintah provinsi, atau pemerintah daerah kepada kelompok peternak yang memelihara ternaknya di lahan perkebunan, di sekitar lahan tanaman pangan, hortikultura atau di lahan kehutanan, untuk digunakan dalam pengadaan sapi bibit dan fasilitas pendukungnya.
3) Pengadaan sarana prasarana untuk mewujudkan usaha peternakan pola integrasi dan untuk mencukupi kebutuhan pakan dari limbah pengolahan sawit (BIS) atau limbah agroindustri lainnya (tetes, onggok, dlsb).

b. Integrasi ternak-tanaman melalui program CSR dari perusahaan perkebunan atau agribisnis lainnya, dengan cara:

1) Perusahaan agribisnis (di luar bidang peternakan) menyediakan bantuan ternak, kredit lunak, ataupun modal abadi kepada kelompok peternak yang berusaha di lahan perusahaan tersebut untuk menambah populasi sapi.
2) Perusahaan pertambangan atau lainnya (bukan usaha agribisnis peternakan) menyediakan bantuan ternak, kredit lunak, ataupun modal abadi bagi kelompok peternak di sekitar atau di luar usaha non-agribisnis tersebut untuk mengembangkan usaha peternakan. Usaha yang merupakan implementasi program CSR perusahaan tersebut dikembangkan dengan menggunakan pola inti-plasma.

**4. Pemberdayaan dan peningkatan kualitas RPH**

Peningkatan kualitas RPH ditargetkan untuk penerapan hygiene dan sanitasi di RPH dalam upaya penyediaan pangan asal ternak yang ASUH (Aman Sehat Utuh dan Halal). Dengan kegiatan ini diharapkan akan terwujud 25 RPH di 20 provinsi yang memenuhi standar internasional. Kegiatan ini diharapkan akan dapat memudahkan pencegahan pemotongan sapi betina produktif. Adapun pelaksanaan kegiatan operasional meliputi :

a. Pembangunan RPH baru di provinsi yang memiliki potensi dalam usaha pemotongan hewan namun belum memiliki fasilitas RPH yang memenuhi persyaratan teknis hygiene-sanitasi dengan cara:
   1) Pembangunan RPH baru yang memenuhi persyaratan teknis hygiene-sanitasi dan kesejahteraan hewan, baik dari aspek lokasi, prasarana jalan dan air bersih, bangunan, dan peralatan.
   2) Penyiapan Sumberdaya Manusia RPH yang terampil dan terlatih.
   3) Peningkatan kemampuan pengelola RPH dalam menerapkan manajemen RPH sebagai sarana pelayanan masyarakat untuk menghasilkan produk yang ASUH.
b. Renovasi RPH yang sudah ada dengan cara:
   1) Fasilitasi perbaikan bangunan dan/atau peralatan RPH sehingga mampu menerapkan praktek hygiene-sanitasi dan kesejahteraan hewan.
   2) Pembinaan pelayanan teknis kesmavet di RPH.
   3) Penatalaksanaan manajemen dan operasional RPH yang mengacu kepada prinsip sistem jaminan keamanan dan kehalalan pangan.

## B. Peningkatan Produktivitas dan Reproduktivitas Ternak Sapi Lokal

### 5. Optimalisai IB dan InKA

Kegiatan ini ditargetkan untuk meningkatkan jumlah kelahiran melalui teknik IB dan InKA, dengan melaksanakan kegiatan operasional sebagai berikut:

a. Penambahan jumlah akseptor IB, dengan cara:
   1) Redistribusi sapi betina produktif hasil penjaringan maupun pemanfaatan sapi *ex-impor* yang layak dibiakkan.
   2) Pendataan peternak yang ternaknya dapat dijadikan akseptor dalam perkawinan melalui teknik IB.
   3) Penambahan jumlah straw semen beku 80% melebihi jumlah akseptor, melalui program pemerintah maupun KSO (swadaya).
   4) Pengembangan sarana prasarana pendistribusian straw semen beku, termasuk fasilitas untuk inseminator.
   5) Pembangunan Unit Layanan Inseminasi Buatan (ULIB) di sekitar lokasi beberapa kelompok peternak yang memiliki jumlah minimal tertentu dan peternaknya siap untuk mengikuti program IB.
   6) Pembangunan Unit Wilayah Inseminasi Buatan (UWIB) sebagai unit yang mengkoordinir ULIB di wilayah masing-masing.
   7) Pelatihan bagi inseminator, pemeriksaan kebuntingan (PKB), dan asisten teknis reproduksi (ATR).
   8) Penambahan dan replacement bibit jantan sebagai donor semen di Balai/Balai-Besar IB.
   9) Penambahan jumlah tenaga inseminator mandiri melalui pelatihan bagi pemuda desa dan pemberian bantuan peralatan IB.
   10) Pemberdayaan Pos IB dan keswan.

b. Penambahan jumlah akseptor InKA dan pejantan pemacek dengan cara:
   1) Pengadaan dan distribusi pejantan pemacek di kelompok peternak yang belum memanfaatkan teknik IB dan belum memiliki pejantan berkualitas.
   2) Pendataan kelompok peternak yang sapi betina produktifnya tidak dikawinkan melalui teknik IB.
   3) Penguatan manajemen dan organisasi kelompok peternak dalam mengelola sapi.

**6. Penyediaan dan pengembangan pakan dan air**

Kegiatan ini ditargetkan untuk dapat memenuhi kebutuhan air minum dan pakan pada saat musim kering, seiring dengan peningkatan jumlah ternak sapi, dengan melaksanakan kegiatan operasional sebagai berikut:

a. Penambahan penyediaan pakan dan air, dengan cara :

1) Penanaman dan pengembangan sumber benih/bibit tanaman pakan ternak (TPT).

a) Inventarisasi lokasi sumber dan jenis benih/bibit tanaman pakan ternak (rumput atau *legume*) di Indonesia.

b) Penanaman benih/bibit tanaman pakan ternak di BPTU, UPTD daerah dan kawasan pengembangan ternak.

c) Pengembangan *feed bank* (lumbung pakan).

2) Pembuatan embung, pompa air, dan konservasi lahan untuk menjamin ketersediaan air minum saat musim kemarau.

3) Pengembangan desa mandiri pakan melalui gerakan massal penanaman tanaman pakan dan pemanfaatan limbah pertanian di lokasi kelompok peternak sapi potong (antara lain kelompok PMUK, BPLM, SMD, LM3) dan di lokasi lain seperti daerah aliran sungai, sekitar embung, lahan kritis, tambang batubara, dan bekas lahan hutan produksi, atau terintegrasi dengan lahan perkebunan dalam suatu pola tumpangsari.

4) Perluasan dan revitalisasi padang penggembalaan di wilayah yang berpotensi untuk pengembangan ternak pola *grazing*.

5) Peningkatan pemanfaatan limbah agroindustri seperti limbah atau hasil samping perkebunan atau pabrik pengolahan sawit (bungkil inti sawit), pabrik gula (tetes), dan pabrik penggilingan padi (dedak).

b. Pengembangan teknologi dan industri pakan ternak berbasis sumber daya lokal, dengan cara:

1) Pengembangan teknologi pakan, melalui aplikasi teknologi pakan (pengolahan, pengawetan, penyimpanan) dan pengadaan peralatannya di kelompok peternak.

2) Penguatan kelembagaan yang menangani pengujian dan standarisasi mutu pakan.

3) Pengembangan mini feedmill di kelompok peternak yang memiliki populasi ternak dengan jumlah minimal tertentu.

4) Peningkatan kualitas SDM bidang pakan, termasuk staf yang memiliki jabatan fungsional pengawasan mutu pakan (wastukan), serta penyediaan tenaga baru untuk wastukan di daerah/wilayah.
5) Restrukturisasi sistem tata niaga bahan baku pakan lokal.

**7. Penanggulangan gangguan reproduksi dan peningkatan pelayanan kesehatan hewan**

Kegiatan ini ditargetkan untuk mengurangi tingkat kegagalan reproduksi sapi betina produktif yang telah dikawini/diinseminasi, dengan melaksanakan kegiatan operasional sebagai berikut:

a. Penanggulangan gangguan reproduksi, dengan cara:
   1) Pemeriksaan akseptor terhadap status penyakit *Brucellosis* (khusus di daerah yang belum bebas *Brucellosis*);
   2) Peningkatan kualitas SDM yang menangani penyakit reproduksi;
   3) Pengadaan obat-obatan dan hormonal;
   4) Penanganan ternak yang mengalami gangguan reproduksi;
   5) Monitoring, evaluasi, dan pelaporan.
b. Peningkatan pelayanan kesehatan hewan, dengan cara:
   1) Pembangunan pusat kesehatan hewan di wilayah padat ternak.
   2) Pemeriksaan, identifikasi, dan pemetaan kasus parasit internal dan kematian pedet.
   3) Pengadaan obat-obatan parasit internal, terapi antibiotika, dan penambah daya tahan

## C. Pencegahan Pemotongan Sapi Betina Produktif

**8. Penyelamatan Sapi Betina Produktif**

Kegiatan ini ditargetkan untuk mencegah pemotongan sapi betina produktif sebanyak 150-200 ribu ekor per tahun dengan melakukan penjaringan dan penyelamatan pedet yang dilahirkan di kelompok peternak, melalui pelaksanaan kegiatan operasional sebagai berikut :

a. Pemeriksaan reproduksi sapi betina produktif di RPH dan di pasar hewan, terutama yang masih berumur muda atau berpotensi melahirkan anak beberapa kali lagi.
b. Fasilitasi dana talangan untuk menyelamatkan sapi betina produktif di tingkat RPH dan mendistribusikannya ke kelompok peternak terpilih.

c. Pembinaan kelompok peternak yang sudah mengembangkan sapi betina produktif hasil penjaringan dan kelompok peternak pembibit lainnya.
d. Penambahan tenaga paramedis dan peningkatan kemampuan teknis petugas reproduksi.

## D. Penyediaan Bibit Sapi Lokal

Kegiatan ini ditargetkan untuk meningkatkan jaminan ketersediaan benih dan bibit sapi yang berkualitas dalam rangka memenuhi kebutuhan sapi potong lokal sehingga produksi daging di dalam negeri dapat meningkat dan mencukupi kebutuhan sebagian besar daging sapi, melalui pelaksanaan kegiatan operasional sebagai berikut:

9. **Penguatan wilayah sumber bibit dan kelembagaan usaha pembibitan,** dengan cara:
   a. Pengidentifikasian wilayah yang berpotensi sebagai sumber bibit sapi.
   b. Penetapan wilayah sumber bibit sapi yang memiliki potensi menghasilkan bibit.
   c. Penguatan Unit Pelaksana Teknis (UPT) pembibitan dan sinergisme antar UPT lingkup Kementerian Pertanian dalam rangka seleksi, penjaringan, dan penyediaan bibit sapi unggul.

10. **Pengembangan usaha pembibitan sapi potong melalui VBC,** dengan cara**:**
    a. Penyusunan kriteria *Village Breeding Centre* (VBC) berdasarkan acuan ilmiah.
    b. Penambahan jumlah sapi bibit di kelompok peternak yang sudah berpengalaman sesuai dengan kemampuannya dan mempunyai daya dukung pakan yang memadai.
    c. Pelatihan dan pendampingan kelompok peternak dalam rangka menerapkan program VBC berdasarkan prinsip *Good Breeding Practice.*
    d. Penetapan standard mutu bibit melalui sertifikasi bibit untuk menjaga/ meningkatkan harga bibit di tingkat UPT maupun di tingkat peternak.

11. **Penyediaan sapi bibit melalui subsidi bunga (KUPS),** dengan cara**:**
    a. Sosialisasi KUPS di pusat dan daerah oleh Kemtan, Bank, Dinas/Pemda, Asosiasi/Kelompok Peternak.
    b. Pemetaan daerah yang berpotensi menyerap program KUPS.

c. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan KUPS antara Kemtan, Kemkeu, Perbankan dan *stakeholders* terkait.

d. Monitoring ketersediaan ternak di dalam dan luar negeri dengan kualitas yang memadai dan harga yang kompetitif.

e. Identifikasi dan klarifikasi pelaksana dan pemanfaatan KUPS.

f. Penguatan modal usaha kelompok peternak sapi potong.

g. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan KUPS secara berjenjang.

h. Koordinasi dengan Pemda untuk pengalokasian dana (APBD/DAK/DAU) untuk dana penjaminan KUPS pada bank daerah.

i. Pengintegrasian program KUPS dalam program SMD.

## E. Pengaturan Stock Daging Sapi Dalam Negeri.

### 12. Pengaturan stock sapi bakalan dan daging.

a. Pengaturan stock sapi bakalan.

Kegiatan ini ditargetkan untuk memberdayakan usaha peternakan sapi potong berbasis sumber daya lokal, melalui kegiatan operasional sebagai berikut:

1) Penerapan regulasi impor sapi bakalan secara benar dan konsisten.
2) Penyusunan regulasi setingkat Peraturan Menteri tentang pemasukan dan pengeluaran sapi potong dan bibitnya; serta penyusunan pedoman (SOP) untuk impor sapi bakalan.
3) Pengawasan dan pemantauan kegiatan impor sapi potong bakalan sesuai dengan paraturan dan perundang-undangan yang ada.
4) Pembinaan kepada perusahaan *feedlot* agar mengkonversi usahanya menjadi perusahaan penggemukan berbasis sapi lokal atau menjadi perusahaan pembibitan secara bertahap.
5) Revitalisasi sistem karantina hewan terkait dengan impor bibit dan sapi bakalan.

b. Pengaturan stock daging.

Kegiatan operasional ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing produk daging lokal, melalui kegiatan operasional :

1) Penyempurnaan dan penegakan Peraturan Menteri Pertanian tentang pemasukan daging yang terjamin ASUH.
2) Pengawasan dan pemantauan kegiatan impor daging sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

3) Pembinaan kepada importir dan distributor daging agar mendukung pengembangan perdagangan daging sapi lokal.
4) Pengembangan klasifikasi potongan daging sapi lokal.

**13. Pengaturan distribusi dan pemasaran sapi dan daging**

a. Pengaturan distribusi dan pemasaran sapi.

Kegiatan ini ditargetkan untuk menjamin ketersediaan sapi di dalam negeri dan menjaga stabilitas harga sapi, melalui kegiatan operasional sebagai berikut:

1) Penetapan pengeluaran dan pemasukan sapi untuk keperluan bibit maupun pengembangan sapi antar wilayah oleh pemerintah daerah melalui koordinasi dengan pemerintah pusat.
2) Penyusunan regulasi setingkat Peraturan Menteri tentang pendistribusian dan pemasaran sapi.
3) Pengawasan dan pemantauan kegiatan perdagangan sapi potong antar wilayah, serta pendistribusian dan pemasarannya.
4) Revitalisasi sistem karantina hewan terkait dengan perdagangan sapi bibit dan sapi bakalan antar wilayah.
5) Pengaturan distribusi dan pemasaran sapi di dalam negeri.

b. Pengaturan distribusi dan pemasaran daging di dalam negeri.

Kegiatan operasional ini bertujuan menjamin ketersediaan daging di dalam negeri dan menjaga stabilitas harga daging, melalui kegiatan operasional :

1) Peningkatan pengawasan dan pemantauan distribusi daging impor
2) Pengendalian distribusi daging impor berdasarkan kelengkapan fasilitas rantai dingin dari importir sampai ke ritel.

# BAB IX
# RENCANA AKSI

Program Swasembada Daging Sapi Tahun 2014 ditempuh dengan berbagai langkah yang dirumuskan dalam rencana aksi sebagai berikut :

## A. Penyediaan Bakalan/Daging Sapi Lokal

Justifikasi : Sapi lokal harus dijadikan tulang punggung dalam penyediaan daging nasional. Permasalahan yang dihadapi selama ini antara lain adalah terbatasnya jumlah sapi bakalan lokal yang dapat dimanfaatkan untuk penggemukan. Oleh karena itu impor sapi bakalan cenderung terus meningkat, yang setiap tahun dapat menguras devisa sampai Rp. 4,8-5 trilyun. Impor yang semula ditujukan untuk mengisi kekurangan, ternyata sudah berpotensi mengganggu usaha penggemukan sapi lokal. Mestinya jumlah devisa yang terserap ke luar negeri lebih tepat digunakan untuk mengembangkan usaha penyediaan sapi bakalan dan daging lokal yang akan berdampak pada peningkatan kemandirian dan daya saing. Untuk menstimulasi peternak agar mengembangkan usaha peternakan sapi lokal, perlu didukung program dan fasilitas usaha budidaya dan penggemukan sapi lokal.

Tujuan : Meningkatkan ketersediaan bakalan dan daging yang berasal dari sapi lokal.

Target : Sapi bakalan yang potensial untuk dipotong pada tahun 2014 sebanyak 2.779 juta dan potensi daging lokal 525.477 ton

Manfaat : Memacu pertumbuhan ekonomi pedesaan melalui pengembangan usaha pembiakan dan penggemukan sapi lokal. Menstimulasi para peternak untuk memfokuskan usaha budidaya sapi lokal maupun hasil IB, serta melestarikan plasma nutfah sapi lokal yang sangat adaptif.

### 1. Pengembangan Usaha Pembiakan dan Penggemukan Sapi Lokal

| | |
|---|---|
| Kegiatan operasional ini bertujuan untuk meningkatkan populasi sapi bakalan dan daging lokal. | |
| Program aksi: | a. Penguatan modal usaha kelompok peternak melalui pemberian kredit lunak jangka panjang atau modal abadi dalam bentuk bantuan sosial dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah kepada kelompok peternak yang dipilih berdasarkan kriteria tertentu. |

| | |
|---|---|
| | b. Pengembangan Program Sarjana Membangun Desa dan pengembangan sistem manajemen regional melalui Sarjana Membangun Desa, dengan cara:<br>1) Bantuan kredit lunak jangka panjang atau penyediaan modal abadi dalam bentuk bantuan sosial dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah kepada SMD dan kelompok peternak terpilih.<br>2) Pemberian bantuan dana bagi sarjana pengelola kelompok peternak untuk mengembangkan manajemen dan organisasi usaha kelompok dalam rangka meningkatkan kapasitas usaha dan jejaring usaha pembiakan dan/atau penggemukan serta pemasaran. |
| Target : | a. PMUK pada tahun 2010 (100 klp), 2011(100 klp), 2012 (100 klp), 2013 (100 klp ) dan 2014 (100 klp )<br>b. SMD pada tahun 2010 (514 klp), 2011 (514 klp), 2012 (514 klp), 2013 (514 klp) dan 2014 (514 klp) |
| Pelaksana : | Direktorat Jenderal Peternakan dan Eselon I Lingkup Kementerian Pertanian beserta UK/UPT di bawahnya, Kepala Daerah (Gubernur dan/atau Bupati), gapoknak/ poknak, pengusaha, koperasi, Lembaga Litbang dan Perguruan Tinggi, serta lembaga/instansi lain yang terkait. |

**2. Pengembangan Pupuk Organik dan Biogas**

| | |
|---|---|
| Kegiatan operasional ini bertujuan untuk memberikan stimulasi bagi usaha pembiakan dan penggemukan sapi atau usaha *cow calf operation* pola kereman. | |
| Program :<br>Aksi | a. Pengembangan usaha pupuk organik dan sistem jaringan pemasarannya, melalui :<br>1) Pemberian fasilitas dana dan dukungan teknologi untuk pembangunan rumah kompos (bangunan penyimpanan dan pemrosesan kotoran ternak menjadi pupuk organik) beserta semua perangkat dan ternaknya di kelompok peternak usaha pembiakan dan penggemukan yang populasinya memiliki jumlah minimal tertentu.<br>2) Pemberian pelatihan manajemen pemeliharaan sapi pola *'zero waste'*, pengolahan limbah sapi dan |

| | |
|---|---|
| | manajemen organisasi bagi kelompok peternak pengelola rumah kompos.<br>3) Fasilitasi pengembangan promosi dan jaringan pemasaran sapi dan pupuk organik.<br>b. Pembangunan instalasi biogas untuk penyediaan energi alternatif di pedesaan, melalui :<br>1) Pemberian bantuan dana maupun teknologi untuk membangun instalasi biogas beserta seluruh perangkat penunjangnya di kelompok peternak sapi penggemukan atau usaha *cow calf operation* yang populasinya memiliki jumlah minimal tertentu dan kandang komunal.<br>2) Pemberian pelatihan manajemen pemanfaatan biogas secara optimal bagi anggota kelompok peternak. |
| Target : | Jumlah pengembangan pupuk organik dan biogas pada tahun 2010 (300 unit), 2011 (300 unit), 2012 (300 unit), 2013 (300 unit) dan 2014 (300 unit). |
| Pelaksana : | Direktorat Jenderal Peternakan dan Eselon I Lingkup Kemtan beserta UK/UPT di bawahnya, Kepala Daerah (Gubernur dan/atau Bupati), gapoknak/poknak, pengusaha, koperasi, Lembaga Litbang dan Perguruan Tinggi, serta lembaga/instansi lain yang terkait. |

**3. Pengembangan Integrasi ternak sapi dan tanaman**

| | |
|---|---|
| Kegiatan operasional ini bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah bagi usaha agribisnis pola integrasi tanaman-ternak melalui pendekatan *low external input sustainable agriculture* (LEISA) dan meningkatkan jumlah/populasi dan kualitas ternak sapi. | |
| Program : Aksi | a. Integrasi tanaman ternak untuk usaha pembiakan sapi potong di lahan perkebunan, kehutanan, hortikultura, lahan pasca tambang dll, dengan cara:<br>1) Koordinasi dengan perusahaan yang berperan sebagai inti, antara lain PTP/Perusda/swasta perkebunan/ kehutanan atau pertambangan.<br>2) Bantuan kredit lunak atau pemberian modal abadi bagi para peternak dari pemerintah pusat dan daerah bagi kelompok peternak yang melakukan integrasi dengan tanaman (perkebunan, hortikultura, tanaman hutan). |

| | |
|---|---|
| | 3) Pengadaan sarana prasarana untuk mewujudkan usaha peternakan pola integrasi dan untuk mencukupi kebutuhan pakan dari limbah pengolahan sawit atau limbah agroindustri lainnya (tetes, onggok, dlsb).<br>b. Integrasi ternak – tanaman melalui program CSR, Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL), dengan cara :<br>1) Perusahaan agribisnis (di luar bidang peternakan) menyediakan bantuan ternak, kredit lunak, ataupun modal abadi kepada kelompok peternak yang berusaha di lahan perusahaan untuk menambah populasi sapi.<br>2) Perusahaan pertambangan atau lainnya (bukan usaha agribisnis) menyediakan bantuan ternak, kredit lunak, ataupun modal abadi bagi kelompok peternak di sekitar atau di luar usaha non-agribisnis untuk mengembangkan usaha peternakan |
| Target : | Jumlah integrasi tanaman-ternak sapi pada tahun 2010 (11 paket), 2011 (22 paket), 2012 (33 paket), 2013 (44 paket) dan 2014 (55 paket). |
| Pelaksana : | Direktorat Jenderal Peternakan dan Eselon I Lingkup Kemtan beserta UK/UPT di bawahnya, Kepala Daerah (Gubernur dan/atau Bupati), gapoknak/poknak, Lembaga Litbang dan Perguruan Tinggi, PTPN, Perusahaan perkebunan, perhutani, perusahaan pertambangan, serta lembaga/instansi lain yang terkait. |

**4. Pemberdayaan dan Peningkatan Kualitas RPH**

| | |
|---|---|
| Kegiatan operasional ini bertujuan untuk mengawasi pemotongan sapi betina produktif sekaligus untuk meningkatkan status hygiene dan sanitasi RPH dalam rangka penyediaan daging yang ASUH. | |
| Program :<br>Aksi | a. Pembangunan RPH baru di propinsi yang memiliki potensi dalam usaha pemotongan hewan namun belum memiliki fasilitas RPH yang memenuhi persyaratan teknis higiene-sanitasi dengan cara:<br>1) Pembangunan RPH baru yang memenuhi persyaratan teknis higiene-sanitasi dan kesejahteraan hewan, baik dari aspek lokasi, prasarana jalan dan air bersih, |

| | |
|---|---|
| | bangunan, dan peralatan.<br>2) Penyiapan Sumberdaya Manusia RPH yang terampil dan terlatih.<br>3) Peningkatan kemampuan pengelola RPH dalam menerapkan manajemen RPH sebagai sarana pelayanan masyarakat berbasis keamanan dan kehalalan pangan (daging).<br>b. Renovasi RPH yang sudah ada dengan cara:<br>1) Fasilitasi perbaikan bangunan dan/atau peralatan RPH sehingga mampu menerapkan praktek Higiene-sanitasi dan kesejahteraan hewan.<br>2) Pembinaan pelayanan teknis kesmavet di RPH.<br>3) Penatalaksanaan manajemen dan operasional RPH mengacu kepada prinsip sistem jaminan keamanan dan kehalalan pangan |
| Target : | a. Jumlah RPH pada tahun 2010 (5 unit), 2011 (6 unit), 2012 (7 unit), 2013 (4 unit) dan 2014 (6 unit)<br>b. Tersedianya SDM RPH terampil dan terlatih sebagai pengelola, penanggung jawab teknis, juru sembelih halal, dan pekerja yang menangani daging. |
| Pelaksana : | Ditjen Peternakan, Pemda Provinsi/Kabupaten/Kota dan Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan masyarakat veteriner. |

## B. Peningkatan Produktivitas dan Reproduktivitas Ternak Sapi Lokal

Justifikasi : Percepatan pencapaian target populasi sapi lokal sangat ditentukan oleh produktivitas sapi dan performa reproduksinya. Secara genetis sapi lokal seperti Sapi Bali, sapi PO dsb memiliki kinerja reproduksi yang baik. Sementara itu sapi hasil IB hanya akan mengekspresikan potensinya bila mendapat perlakuan yang semestinya. Untuk meningkatkan produktivitas dan kemampuan reproduksi yang optimal sapi lokal maupun sapi silangan hasil IB perlu diupayakan penyediaan pakan berbasis sumberdaya lokal secara mudah, murah, dan berkelanjutan.

Tujuan : Meningkatkan angka kebuntingan dan kelahiran sapi lokal dan sapi silangan hasil IB, sekaligus menekan angka kematian sehingga menambah populasi sapi lokal.

Target : Kelahiran sapi tahun 2014 sebanyak 3,364 juta ekor dengan masing-masing kontribusi IB 1,89 juta ekor dan Kawin Alam 1,474 juta ekor.

Manfaat : Menstimulasi lembaga IB baik daerah dan pusat untuk menyediakan straw yang diperlukan dan mendorong pemberdayaan pos IB dan tenaga IB. Hasil yang diharapkan adalah peningkatan populasi yang sekaligus dapat membantu untuk meningkatkan skala usaha peternak.

**5. Optimalisasi IB dan InKA**

| | |
|---|---|
| Kegiatan operasional ini bertujuan meningkatkan jumlah kelahiran anak melalui optimalisasi IB dan Intensifikasi kawin alam (InKA). | |
| Program : Aksi | a. Penambahan jumlah akseptor IB, dengan cara:<br>1) Redistribusi sapi betina produktif hasil penjaringan maupun pemanfaatan sapi ex-impor yang layak dikembangbiakkan<br>2) Pendataan peternak yang ternaknya bersedia dijadikan akseptor dalam perkawinan melalui teknik IB.<br>3) Penambahan jumlah straw semen beku 80% melebihi dari jumlah akseptor, melalui program pemerintah maupun KSO (swadaya).<br>4) Pengembangan sarana prasarana pendistribusian straw semen beku.<br>5) Pembangunan Unit Layanan Inseminasi Buatan (ULIB) di sekitar lokasi beberapa kelompok peternak yang memiliki jumlah minimal tertentu dan peternaknya siap untuk mengikuti program IB.<br>6) Pembangunan Unit Wilayah Inseminasi Buatan (UWIB) sebagai unit yang mengkoordinir ULIB di wilayah masing-masing.<br>7) Pelatihan bagi inseminator, pemeriksaan kebuntingan (PKB), dan asisten teknis reproduksi (ATR).<br>8) Penambahan dan replacement bibit jantan sebagai donor semen di Balai/Balai Besar IB. |

| | |
|---|---|
| | 9) Penambahan jumlah tenaga inseminator mandiri melalui pelatihan bagi pemuda desa dan pemberian bantuan peralatan IB.<br>10) Pemberdayaan dan pembuatan Pos IB dan keswan.<br>b. Penambahan jumlah akseptor InKA dan pejantan pemacek.<br>1) Pendataan kelompok peternak yang sapi betina produktifnya tidak dikawinkan melalui teknik IB.<br>2) Pengadaan dan pendistribusian pejantan pemacek di kelompok peternak yang memiliki jumlah minimal tertentu untuk sapi betina produktif.<br>3) Penguatan manajemen dan organisasi kelompok peternak dalam mengelola sapi. |
| Target : | 1) Angka kelahiran IB : tahun 2010 (1,3 juta ekor ), 2011 (1,4 juta ekor ), 2012 (1,6 juta ekor ), 2013 (1,8 juta ekor ), dan 2014 (1,9 juta ekor )<br>2) Angka kelahiran InKA : tahun 2010 (1,4 juta ekor ), 2011 (1,4 juta ekor ), 2012 (1,4 juta ekor ), 2013 (1,4 juta ekor), dan 2014 (1,5 juta ekor ) |
| Pelaksana : | Ditjenak, Dinas terkait peternakan, gapoknak/poknak |

**6. Penyediaan dan Pengembangan Pakan dan Air**

| | |
|---|---|
| Kegiatan operasional ini bertujuan menjamin penyediaan pakan dan air untuk memenuhi kebutuhan pokok bagi kelompok peternak dan unit usaha pembibitan maupun penggemukan sapi, mengakselerasi proses pertambahan populasi sapi melalui pengembangan sistem produksi berbasis pastura (padang penggembalaan) atau *cut and carry system* dengan sistem extensive dan managemen murah (*low external input management*) | |
| Program :<br>Aksi | a. Penyediaan pakan, dilakukan melalui:<br>1) Penanaman dan pengembangan sumber benih HMT, yang akan dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :<br>a) Inventarisasi lokasi sumber dan jenis benih/bibit tanaman pakan ternak (rumput atau legum) di Indonesia.<br>b) Penanaman benih/bibit tanaman pakan ternak di UPT baik pusat maupun UPTD.<br>c) Pengembangan *feed bank* atau lumbung pakan ternak. |

| | |
|---|---|
| | 2) Pembuatan embung, pompa air dan konservasi lahan, terutama dilaksanakan di daerah dengan kondisi iklim atau tanah yang kurang mendukung.<br>3) Pengembangan desa mandiri pakan dilakukan melalui gerakan masal penanaman HMT di beberapa lokasi seperti di kebun kelompok (PMUK, BPLM, SMD, LM3, dsb), dan lokasi lain seperti di tegalan, di bawah pohon, perkebunan, DAS, sekitar embung, lahan-lahan kritis, tambang batubara dan ex-hutan produksi.<br>4) Perluasan dan revitalisasi padang penggembalaan di wilayah yang berpotensi untuk pengembangan ternak.<br>b. Pengembangan teknologi dan industri pakan berbasis sumberdaya lokal, dengan cara:<br>1) Aplikasi teknologi pakan di kelompok.<br>2) Pengembangan mini feedmill. Untuk melengkapi kebutuhan nutrisi ternak maka akan dikembangkan pakan konsentrat sapi potong, sehingga diperlukan sarana pengolahan pakan di kelompok sapi potong.<br>3) Pengembangan kualitas SDM bidang pakan akan dilakukan dengan penambahan atau rekruitmen petugas pengawas mutu pakan di daerah, pengembangan standar mutu pakan, pengembangan pelatihan-pelatihan pakan.<br>4) Pengembangan jaringan laboratorium. Pengawasan mutu perlu dilakukan agar konsumen pakan dapat terlindungi dari kerugian akibat dari pakan yang di konsumsi ternaknya tidak memenuhi standar sesuai SNI atau persyaratan teknis minimal (PTM) yang telah ditetapkan. |
| Target : | a. Jumlah benih HMT pada tahun 2010 (26 juta ton), 2011 (28 juta ton), 2012 (28 juta ton), 2013 (30 juta ton) dan 2014 (30 juta ton), rata-rata 28,4 juta ton/tahun<br>b. Jumlah HMT pada tahun 2010 (215 juta ton), 2011 (222 juta ton), 2012 (227 juta ton), 2013 (233 juta ton) dan 2014 (240 juta ton), rata-rata 227 juta ton/tahun<br>c. Feed mill : 200 buah per tahun. |

| | |
|---|---|
| Pelaksana : | Ditjenak, Badan Litbang, Dinas terkait peternakan, gapoknak/ poknak, PLA. |

**7. Penanggulangan Gangguan Reproduksi dan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Hewan**

| | |
|---|---|
| Program ini bertujuan untuk mengurangi tingkat kegagalan reproduksi ternak betina produktif yang telah berhasil dikawini sebanyak 200-300 ribu akseptor IB dan InKA, dan peningkatan pelayanan kesehatan hewan terhadap 200.000 ekor sapi bakalan. | |
| Program : Aksi | a. Penanggulangan gangguan reproduksi, dengan cara:<br>1). Pemeriksaan akseptor terhadap status Brucellosis (khususnya di daerah yang belum bebas Brucellosis);<br>2). Peningkatan kualitas SDM yang menangani penyakit reproduksi;<br>3). Pengadaan obat-obatan dan hormonal;<br>4). Penanganan ternak yang mengalami gangguan reproduksi;<br>5). Monitoring, evaluasi dan pelaporan.<br>b. Peningkatan pelayanan kesehatan hewan, dengan cara:<br>1). Pembangunan pusat kesehatan hewan di wilayah padat ternak.<br>2). Pemeriksaan, identifikasi dan pemetaan kasus parasit internal dan kematian pedet.<br>3). Pengadaan obat-obatan parasit internal, terapi antibiotika dan penambah daya tahan.<br>4). Monitoring, evaluasi dan pelaporan. |
| Target : | a. Penanggulangan gangguan reproduksi terhadap 200-300 ribu ekor per tahun.<br>b. Pengendalian penyakit hewan bernilai ekonomis tinggi sebanyak 200.000 ekor. |
| Pelaksana : | Ditjenak, Dinas terkait peternakan, Puskeswan, gapoknak/ poknak, serta UK/UPT terkait lingkup Deptan. |

**C. Pencegahan Pemotongan Sapi Betina Produktif**

Justifikasi : Sapi betina produktif merupakan sumber penghasil pedet. Penambahan populasi sapi sangat ditentukan oleh ketersediaan sapi betina produktif yang proporsional secara berkelanjutan. Saat ini tingkat pemotongan sapi betina produktif di Indonesia sudah sampai pada tingkat membahayakan populasi sapi nasional. Oleh

karena itu perlu program terobosan yang dapat mencegah berkurangnya populasi sapi betina produktif

Tujuan : Mempertahankan populasi sapi nasional yang ada melalui pencegahan pemotongan sapi betina produktif .

Target : Terselamatkannya pemotongan sapi betina produktif sebanyak 200 ribu ekor per tahun.

Manfaat : Meningkatkan populasi sapi secara nasional dengan penambahan pedet yang dilahirkan dari sapi betina produktif yang terselamatkan.

**8. Penyelamatan Sapi Betina Produktif**

| | |
|---|---|
| Kegiatan operasional ini bertujuan menyelamatkan 200 ribu ekor sapi betina produktif per tahun yang akan dibawa ke RPH oleh kelompok peternak atau akan dipotong di RPH | |
| Program Aksi : | a. Pemeriksaan status reproduksi sapi betina produktif secara rutin di RPH dan kelompok peternak.<br>b. Fasilitasi dana talangan untuk menyelamatkan sapi betina produktif di tingkat RPH dan di kelompok peternak.<br>c. Pembinaan kelompok peternak yang sudah mengembangkan sapi betina produktif dan kelompok peternak pembibit.<br>d. Penambahan tenaga dan peningkatan kemampuan teknis petugas reproduksi dan manajemen pemeliharaan. |
| Target : | Jumlah sapi betina yang diselamatkan sebanyak 200 ribu ekor per tahun dan penambahan pedet sebanyak 80 ribu ekor sapi betina per tahun (80% kelahiran & rasio jenis kelamin jantan:betina 50:50) |
| Sasaran : | RPH dan kelompok peternak di propinsi sentra produksi dan/atau sentra konsumsi |
| Pelaksana : | Ditjenak, Dinas Provinsi/Kab/Kota yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan masyarakat veteriner, gapoknak/ poknak, BPTP |

## D. Penyediaan Bibit Sapi Lokal

Justifikasi : Bibit merupakan salah satu faktor produksi yang menentukan dan strategis untuk peningkatan populasi dan penyediaan daging nasional. Jumlah bibit di Indonesia masih sangat terbatas dan

semakin diperparah dengan pemotongan betina produktif. Oleh karena itu perlu dilaksanakan kegiatan penguatan kelembagaan pembibitan melalui penerapan *good breeding practice*, peningkatan penerapan standar mutu benih dan bibit ternak, peningkatan penerapan teknologi perbibitan, serta pengembangan usaha dan investasi.

Tujuan : Meningkatkan ketersediaan bibit dalam rangka memenuhi kebutuhan bakalan sapi potong lokal untuk mencapai swasembada daging sapi secara berkelanjutan.

Target : Jumlah bibit yang dihasilkan sampai tahun 2014 adalah sebanyak 1.880.000 ekor; benih 34 juta dosis semen beku; 3.550 embrio

Manfaat : Program penyediaan bibit akan membantu peternak untuk meningkatkan skala pengusahaan dan pendapatan

**9. Penguatan wilayah sumber bibit dan kelembagaan usaha pembibitan**

| | |
|---|---|
| Kegiatan operasional ini bertujuan mengembangkan dan memperkuat wilayah sumber bibit utama serta kelembagaan pengelolaan bibit nasional, sehingga menjadi pemasok bibit dan betina produktif serta menjadi pusat pelestarian sapi asli dan sapi lokal Indonesia. | |
| Program :<br>Aksi | a. Identifikasi wilayah yang berpotensi sebagai sumber bibit sapi.<br>b. Penetapan wilayah sumber bibit sapi yang memiliki potensi menghasilkan bibit.<br>c. Penguatan UPT pembibitan dan sinergisme antar UPT lingkup Deptan dalam rangka penyediaan bibit sapi unggul. |
| Target : | Jumlah semen beku tahun 2010 (4 juta dosis), 2011 (4,25 juta dosis), 2012 (4,5 juta dosis), 2013 (4,75 juta dosis) dan 2014 (5 juta dosis) dan 3.550 embrio<br>Sapi bibit yang bersertifikat : 17.745 ekor |
| Pelaksana : | UK/UPT Perbibitan lingkup Ditjennak dan Litbang, Ditjennak, Dinas yang membidangi fungsi peternakan. |

## 10. Pengembangan Usaha Pembibitan Sapi Potong melalui VBC

| | |
|---|---|
| Kegiatan operasional ini bertujuan meningkatkan populasi bibit di masyarakat yang secara akumulatif memenuhi target kebutuhan bibit nasional. | |
| Program Aksi : | a. Penyusunan kriteria *Village Breeding Centre* (VBC) berdasarkan acuan ilmiah.<br>b. Penambahan jumlah sapi bibit di kelompok peternak yang sudah berpengalaman sesuai dengan kemampuannya.<br>c. Pelatihan dan pendampingan kelompok peternak pembibit (VBC) dalam rangka menerapkan *Good Breeding Practice.*<br>d. Penetapan standar mutu bibit melalui sertifikasi bibit untuk menjaga/meningkatkan harga bibit di peternak. |
| Target : | Dihasilkan 5 ribu ekor bibit per tahun |
| Pelaksana : | Ditjenak, Badan Litbang/BPTP, Perguruan Tinggi, Dinas yang membidangi fungsi peternakan, gapoktan/poktan. |

## 11. Penyediaan sapi bibit melalui subsidi bunga (KUPS)

| | |
|---|---|
| Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan populasi, menyediakan bibit secara berkelanjutan, menumbuhkan industri dan kelompok pembibitan serta memperluas lapangan pekerjaan melalui bantuan permodalan dengan bunga rendah (karena disubsidi oleh pemerintah) bagi pelaku usaha pembibitan. | |
| Program Aksi : | a. Sosialisasi KUPS di pusat dan daerah (Pelaksana: Deptan, Bank, Dinas/Pemda).<br>b. Pemetaan daerah (peserta KUPS) yang berpotensi dalam penyerapan KUPS (Pelaksana Ditjennak, Dinas, Litbang).<br>c. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan KUPS antara Deptan, Depkeu, Perbankan, dan stakeholders terkait.<br>d. Monitoring ketersediaan ternak di dalam dan luar negeri.<br>e. Identifikasi dan klarifikasi pelaksana dan pemanfaatan KUPS.<br>f. Penguatan modal usaha kelompok.<br>g. Pembinaan, pendampingan dan pengawasan pelaksanaan KUPS.<br>h. Koordinasi dengan Pemda untuk pengalokasian dana (APBD/DAK/DAU dll) untuk dana penjaminan KUPS pada bank daerah.<br>i. Pengintegrasian program KUPS dalam program SMD |

| | |
|---|---|
| | dan program lainnya. |
| Target : | Penyerapan kredit untuk pengadaan dan pemeliharaan sapi bibit sebanyak 200 ribu ekor per tahun |
| Pelaksana : | Pelaku Usaha pembibitan sapi (perusahaan, koperasi, kelompok/gapoktan), Perbankan, DepKeu dan Deptan (Ditjenak dan Pusat Pembiayaan), Dinas yang membidangi fungsi peternakan di prov dan kab/kota |

**E. Pengaturan Stock Daging Sapi Dalam Negeri.**

Justifikasi : Angka importasi sapi bakalan setiap tahun mencapai lebih dari 600 ribu ekor, sementara impor daging lebih dari 70 ribu ton. Selain terjadi pengurasan devisa, importasi juga telah mengganggu usaha peternakan sapi lokal sehingga perlu regulasi, pedoman, instrumen dan insentif yang mampu memberi suasana kondusif bagi perkembangan usaha agribisnis sapi potong berdaya saing secara berkelanjutan.

Tujuan : Menstimulasi pengembangan usaha agribisnis sapi potong berbasis sumberdaya lokal dengan dukungan teknologi inovatif tepat guna, sehingga produktivitas ternak dan produksi daging meningkat dan selanjutnya dapat mewujudkan swasembada daging sapi secara berkelanjutan.

Target : Meningkatkan produksi daging sehingga dapat memenuhi 90% kebutuhan pasar domestik, dan selanjutnya diarahkan untuk dapat mengekspor produk tertentu yang berkualitas guna keperluan pasar global.

Manfaat : Program ini akan berdampak pada: (i) penghematan devisa untuk impor daging/sapi, dan (ii) sekaligus untuk memperoleh devisa dari ekspor produk tertentu, serta (iii) membantu peternak untuk mendapatkan keuntungan lebih baik dari harga sapi yang dijual, sehingga (iv) kesejahteraannya meningkat.

**12. Pengaturan stock sapi bakalan dan daging**

**a. Pengaturan stock sapi bakalan**

| | |
|---|---|
| Kegiatan operasional ini bertujuan menerapkan aturan yang lebih kondusif dalam pelaksanaan impor sapi bakalan agar: (i) sesuai dengan SOP, serta (ii) mengikuti prosedur karantina yang benar. | |
| Program : | a. Penerapan regulasi impor ternak sapi bakalan sesuai |

| | |
|---|---|
| Aksi | SOP dan tatacara karantina yang benar secara bertahap dan konsisten.<br>b. Penyempurnaan regulasi setingkat Peraturan Menteri tentang pemasukan dan pengeluaran sapi potong dan bibitnya; serta penyempurnaan dan sosialisasi pedoman (SOP) untuk impor sapi bakalan.<br>c. Pengawasan dan pemantauan kegiatan impor sapi potong bakalan sesuai dengan paraturan dan perundang-undangan yang ada.<br>d. Pembinaan kepada perusahaan *feedlot* agar mengembangkan usahanya bukan hanya memanfaatkan bakalan impor tetapi juga dengan memanfaatkan bakalan lokal, untuk keperluan domestik sekaligus untuk merebut peluang ekspor.<br>e. Revitalisasi sistem karantina hewan terkait dengan impor bibit maupun sapi bakalan yang benar-benar sesuai ketentuan teknis.<br>f. Pembinaan kepada industri penggemukan agar ikut serta dalam usaha *cow calf operation*. |
| Target : | Peningkatan penyediaan daging sapi lokal berbasis sumberdaya domestik untuk memenuhi kebutuhan daging nasional > 90% pada tahun 2014. |
| Pelaksana : | Ditjenak, Badan Karantina, BP2HP, Badan Litbang, Dinas Provinsi/Kab/Kota terkait, Departemen Perdagangan. |

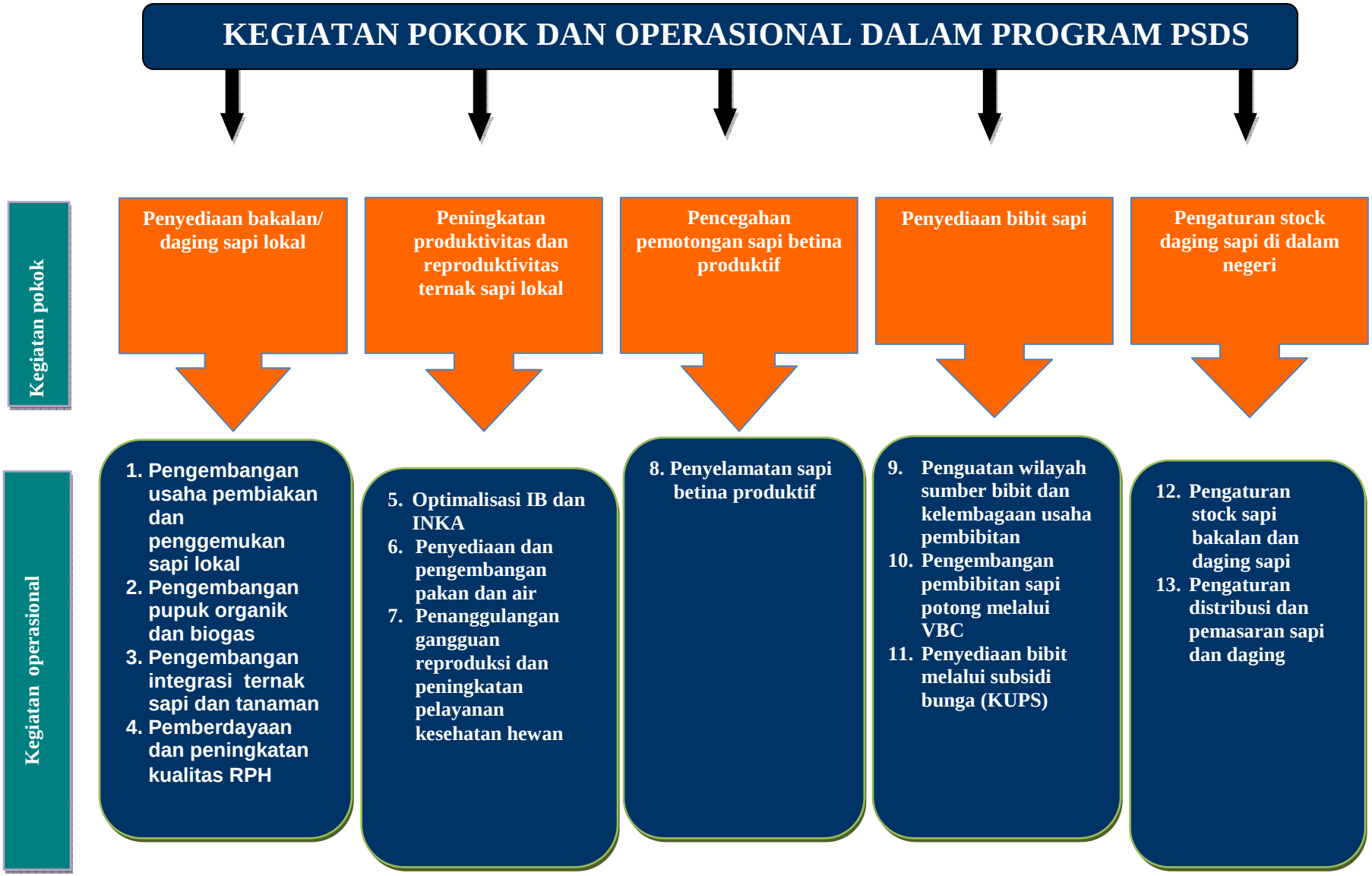
**b. Pengaturan stock daging**

| | |
|---|---|
| Kegiatan operasional ini bertujuan mengurangi impor daging sapi yang tidak berkualitas secara bertahap dan mencegah masuknya produk yang tidak terjamin ASUH atau produk dumping yang dapat mengganggu peternakan dan pasar domestik. | |
| Program :<br>Aksi | a. Penyempurnaan dan penegakan Peraturan Menteri Pertanian tentang pemasukan daging.<br>b. Pengawasan dan pemantauan kegiatan impor daging sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.<br>c. Pembinaan kepada importir dan distributor daging agar mendukung pengembangan perdagangan atau tata-niaga daging sapi lokal. |

| | |
|---|---|
| | d. Pengembangan klasifikasi potongan daging sapi lokal hasil penggemukan. |
| Target : | Mencegah, mengurangi dan menghambat masuknya daging yang tidak terjamin ASUH, daging ilegal, dan daging yang tidak berkualitas (jerohan), serta mengurangi kontribusi daging dan sapi bakalan impor untuk kebutuhan pasar domestik < 10%. |
| Pelaksana : | Ditjenak, Dinas Provinsi/Kab/Kota yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan masyarakat veteriner, pelaku usaha pemasukan dan distribusi daging sapi impor, serta instansi lain yang terkait dengan tataniaga daging. |

Secara diagramatik kegiatan pokok dan kegiatan operasional yang mendukung keberhasilan Program PSDS 2014 disajikan pada Gambar 2.

Gambar 2. Kegiatan pokok dan kegiatan operasional yang mendukung keberhasilan program PSDS 2014

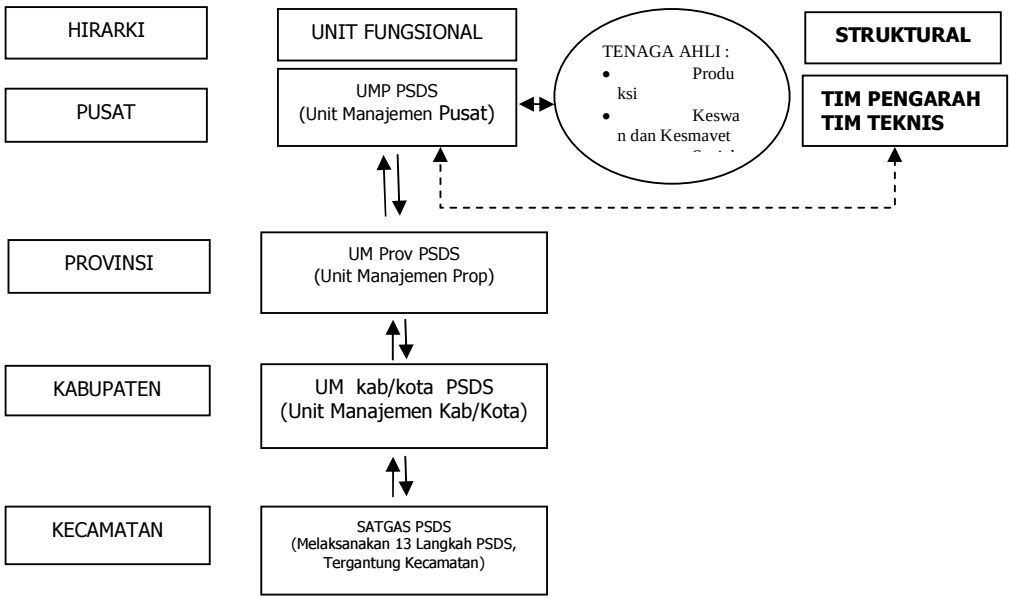


## BAB X
## ORGANISASI PELAKSANA

Dalam rangka mensukseskan pelaksanaan program PSDS 2014, diperlukan struktur organisasi pelaksana yang bersifat operasional, mandiri, berjenjang, dan terkoordinasi sehingga kekurangberhasilan program swasembada daging sapi pada periode sebelumnya tidak terulang lagi. Pada periode tahun 2000 – 2005, organisasi pelaksana tidak dibentuk sehingga pelaksanaan kegiatan tidak jelas dan tidak terarah. Pada periode 2005 – 2010, organisasi pelaksana dibentuk sebagai tim teknis tetapi tidak bersifat operasional.

Untuk itu, organisasi pelaksana PSDS 2014 yang dibentuk saat ini lebih baik dan berjenjang dari tingkat Pusat, Propinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan sebagaimana dijelaskan pada Bagan 1**.**

Bagan 1 Organisasi Pelaksana PSDS.




Keterangan

= Arus Konsultatif, Koordinatif.

= Arus Implementatif, Supervisi, Pembinaan.

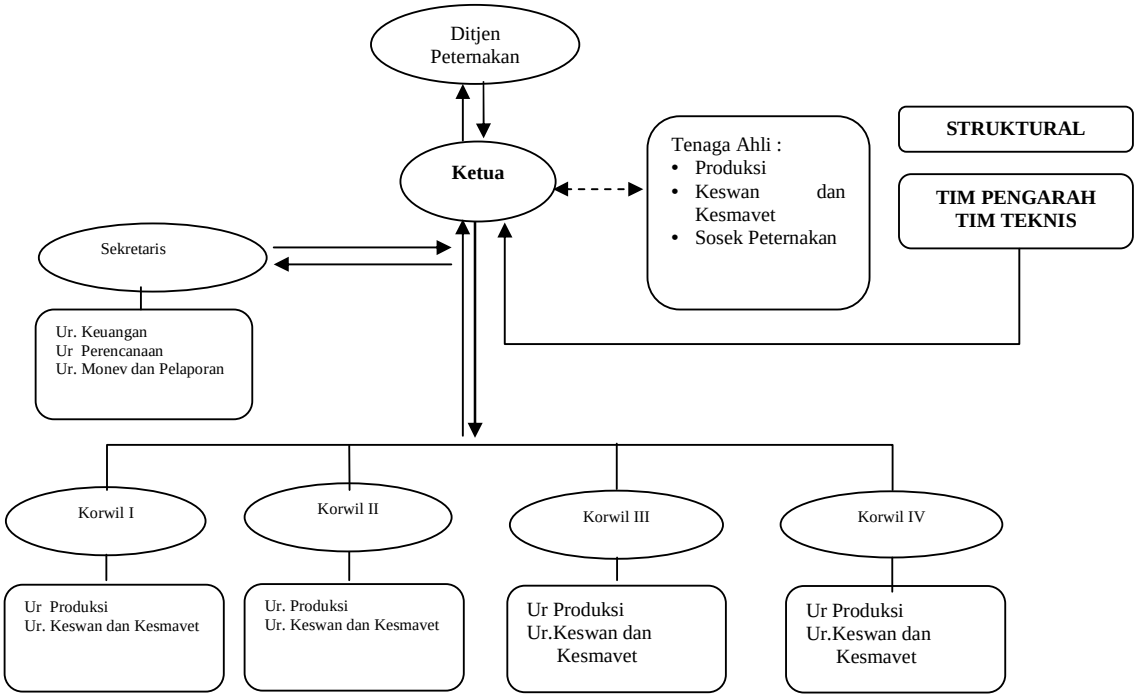
= Arus konsultatif, Pelaporan.

## A. Tingkat Pusat

Keanggotaan Unit Manajemen Pusat (UMP) terdiri dari Ketua, Sekretaris, Tenaga Ahli, Tim Teknis, Tim Pengarah dan empat Koordinator Wilayah yang membidangi urusan produksi, kesehatan hewan dan kesmavet. Penyelenggaraan UM-PSDS 2014 Pusat dilaksanakan oleh Unit Manajemen Pusat yang diketuai oleh Direktur Jenderal Peternakan, dan pelaksanaan sehari-hari dilakukan oleh Ketua Harian. Pelaksana UMP diupayakan tidak rangkap jabatan agar mereka dapat lebih fokus dalam melaksanakan tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas-tugas teknisnya UMP dibantu oleh beberapa tenaga ahli yang kompeten untuk memberikan saran/masukan teknis dan ekonomis dalam penyelenggaraan tugasnya untuk mencapai swasembada daging. Tenaga ahli tersebut bersifat multidisiplin yaitu tenaga ahli produksi, kesehatan hewan dan kesmavet serta ahli di bidang sosial ekonomi peternakan. Tenaga ahli ini akan memberikan masukan operasional kepada UMP untuk dapat dilaksanakan dengan mengacu kepada dokumen blue print serta arahan dari tim pengarah dan tim teknis. Tim Pengarah terdiri dari unsur pengambil kebijakan di tingkat Kementerian Pertanian dan Instansi Terkait lintas sektor, sedangkan Tim Teknis terdiri dari unsur pejabat teknis lingkup Ditjen Peternakan sesuai dengan bidang tugasnya. Organisasi UMP dapat dilihat pada Bagan 2.

Bagan 2 Organisasi Unit Manajemen Pusat (UMP)




Keterangan :

◄·····► = Arus Konsultatif, Koordinatif.
↓ = Arus Implementatif, Supervisi, Pembinaan.
↑ = Arus konsultatif, Pelaporan.

## Tugas, Tanggungjawab, dan Wewenang

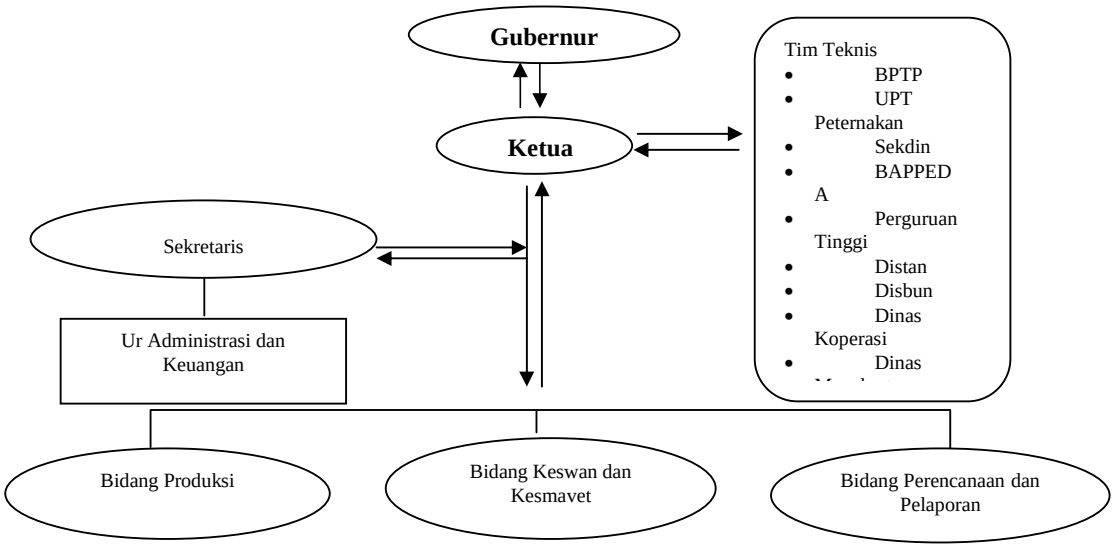
1. Menyiapkan bahan rumusan kebijakan dan rencana strategis program swasembada daging sapi;
2. Melaksanakan langkah-langkah strategis yang diperlukan dalam rangka pencapaian swasembada daging sapi;
3. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan peningkatan populasi, produksi, dan produktivitas sapi antar instansi teknis terkait di Pusat dan di Daerah serta pelaku usaha;
4. Mensosialisasikan langkah-langkah operasional pencapaian swasembada daging sapi kepada aparatur terkait di Pusat dan di Daerah, pelaku usaha, organisasi profesi, asosiasi dan masyarakat (*stakeholders*); dan
5. Melaksanakan pemantauan, supervisi, dan evaluasi program swasembada daging sapi.

## B. Tingkat Provinsi

Unit Manajemen Tingkat Provinsi (UMProv) lebih bersifat koordinatif yang terdiri dari unsur Kesekretariatan, Produksi, Keswan dan Kesmavet serta Unsur Perencanaan dan Pelaporan. Penyelenggaraan UM-PSDS 2014 Provinsi dilaksanakan oleh Unit Manajemen Provinsi yang diketuai oleh Kepala Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan Provinsi, dan tugas sehari-hari dilakukan oleh Ketua Harian. Keanggotaan UM-PSDS Provinsi yang telah ditetapkan diharapkan dapat dibebaskan dari tugas-tugas struktural sehari-hari.

Dalam merencanakan dan melaksanakan PSDS 2014, pelaksana tingkat provinsi diarahkan dan dibina oleh Tim Teknis yang terdiri dari unsur pejabat teknis lingkup pertanian provinsi dan instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya. Secara diagramatis organisasi UMProv dapat dilihat pada Bagan 3.

Bagan 3 Organisasi Tingkat Propinsi (UMProv)




Keterangan

↓ = Arus Implementatif, Supervisi, Pembinaan.

↑ = Arus konsultatif, pelaporan.

### Tugas, Tanggung jawab, dan Wewenang

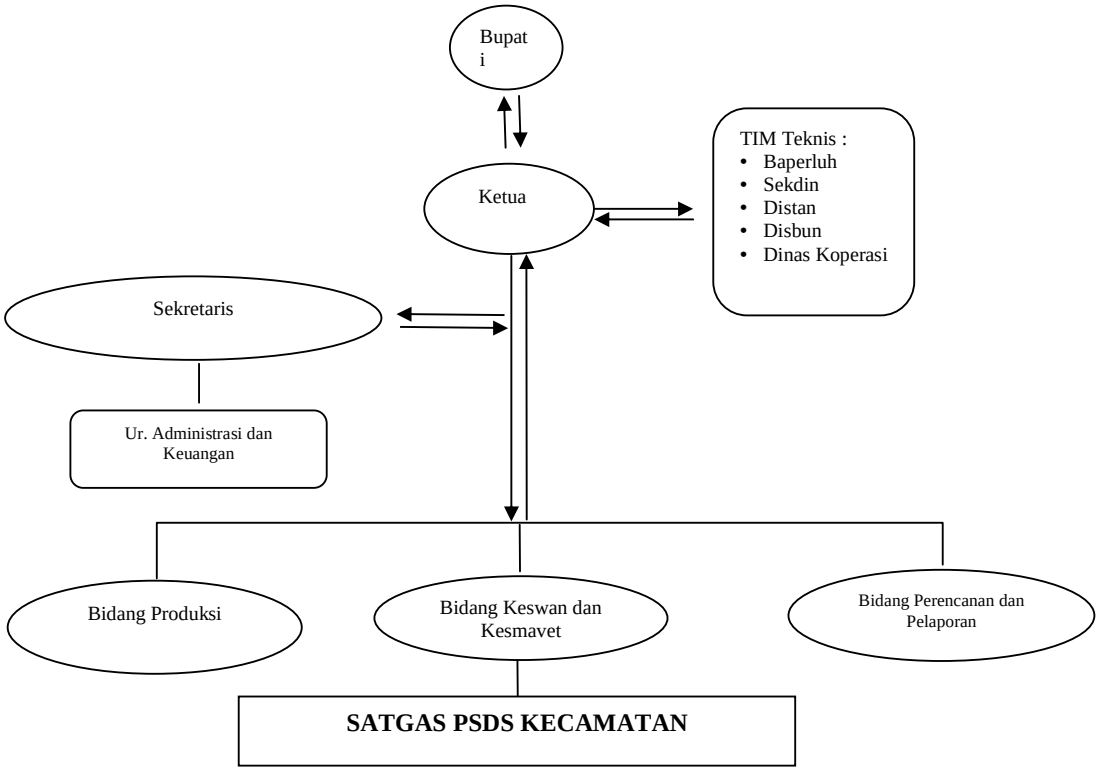
1. Menyiapkan bahan rumusan langkah-langkah kebijakan, rencana strategis, dan petunjuk pelaksanaan swasembada daging sapi di wilayah provinsi untuk kebutuhan nasional;

2. Melaksanakan langkah-langkah strategis yang diperlukan dalam rangka pencapaian swasembada daging sapi di wilayah provinsi untuk kebutuhan nasional;
3. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan peningkatan populasi, produksi dan produktivitas sapi antar instansi teknis terkait dan pelaku usaha di wilayah provinsi;
4. Mensosialisasikan langkah-langkah operasional pencapaian swasembada daging sapi kepada aparatur terkait, pelaku usaha, organisasi profesi, asosiasi dan masyarakat (*stakeholders*) di wilayah provinsi; dan
5. Melaksanakan pemantauan, supervisi, dan evaluasi program swasembada daging sapi di wilayah provinsi.

## C. Tingkat Kabupaten/Kota

Unit Manajemen Tingkat Kabupaten/Kota (UMK) terdiri dari unsur Kesekretariatan, Produksi, Keswan dan Kesmavet serta unsur Perencanaan dan Pelaporan. Penyelenggaraan UM-PSDS 2014 Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Unit Manajemen Kabupaten/Kota yang diketuai oleh Kepala Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan Kabupaten/Kota, dan tugas sehari-hari dilakukan oleh Ketua Harian yang dibantu oleh seorang sekretaris dan urusan administrasi dan keuangan. Pelaksana pada tingkat kabupaten (UMK) diupayakan tidak rangkap jabatan agar dapat lebih fokus dalam melaksanakan tugasnya. Dalam pelaksanaan tugasnya UMK diarahkan dan dibina oleh Tim Teknis yang unsurnya terdiri dari pejabat teknis lingkup pertanian kabupaten dan instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya. Secara diagramatis organisasi dan instansi terkait Kabupaten/Kota dapat dilihat pada Bagan 4.

Bagan 4 Organisasi Tingkat Kabupaten/Kota (UMK)




Keterangan

↓ = Arus Implementatif, Supervisi, Pembinaan.

↑ = Arus konsultatif, Pelaporan.

## Tugas, Tanggungjawab, dan Wewenang

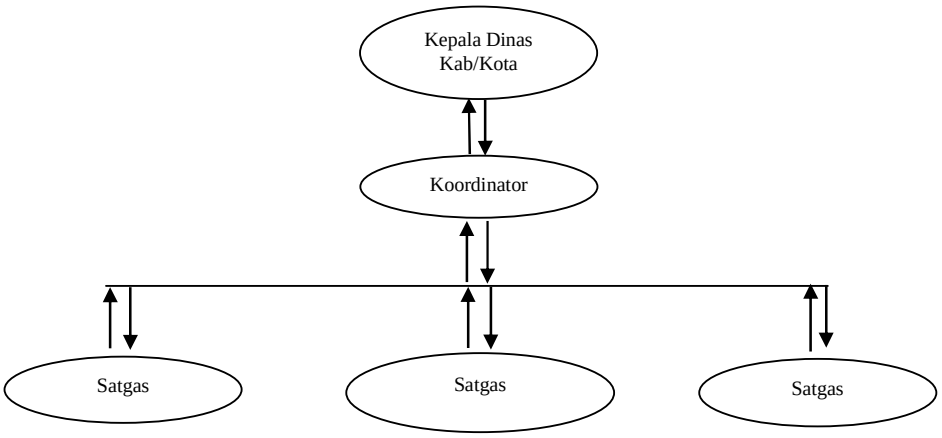
1. Menyiapkan bahan rumusan langkah-langkah kebijakan, rencana strategis, dan petunjuk teknis program swasembada daging sapi di wilayah kabupaten/kota untuk kebutuhan nasional;
2. Melaksanakan langkah-langkah strategis yang diperlukan dalam rangka pencapaian swasembada daging sapi di wilayah kabupaten/kota untuk kebutuhan nasional;
3. Mengkoordinasikan pelaksanakan kegiatan peningkatan populasi, produksi dan produktivitas sapi antar instansi teknis terkait dan pelaku usaha di wilayah kabupaten/kota;
4. Mensosialisasikan langkah-langkah operasional pencapaian swasembada daging sapi kepada aparatur terkait, pelaku usaha, dan masyarakat di wilayah kabupaten/kota; dan
5. Melaksanakan pemantauan, supervisi, dan evaluasi program swasembada daging sapi di wilayah kabupaten/kota.

## D. Tingkat Kecamatan

Bupati/Walikota dalam melaksanakan Unit Manajemen membentuk Satuan Tugas Teknis di setiap kecamatan wilayah PSDS. Pelaksana PSDS Tingkat Kecamatan (Satgas) merupakan ujung tombak pelaksanaan PSDS 2014 yang mempunyai tugas untuk melaksanakan pendampingan teknis, pemberdayaan kelompok, pemantuan dan pelaporan pelaksanaan 13 (tiga belas) kegiatan operasional PSDS 2014 sesuai kondisi setempat. Dalam pelaksanaannya Satgas yang dibentuk dikoordinasikan oleh seorang koordinator.

Sebagai pelaksana tingkat kecamatan (Satgas) disarankan dapat mendayagunakan para Petugas Teknis Peternakan (Inseminator, PKB, ATR, KCD, Medis dan Paramedis), Sarjana Membangun Desa (SMD), dan Penyuluh. Selanjutnya organisasi tingkat kecamatan disajikan pada Bagan 5.

Bagan 5 Organisasi Tingkat Satuan Tugas (Satgas) Kecamatan




Keterangan :
↓ = Arus Implementatif, Supervisi, Pembinaan.
↑ = Arus konsultatif dan Pelaporan.

**Tugas, Tanggungjawab dan Wewenang.**

1. Melaksanakan tugas-tugas teknis operasional IB, InKA, Keswan, Kesmavet, perencanaan dan Pelaporan.
2. Melaporkan secara reguler setiap minggu kepada Kepala Dinas Peternakan atau yang membidangi fungsi peternakan di Kabupaten/Kota/Kota.

# BAB XI
# MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

## A. Monitoring dan Evaluasi

1. Pengertian monitoring adalah melihat atau mengamati jalannya program swasembada daging sapi pada tahun berjalan. Untuk ini akan dilakukan kunjungan lapangan atau dengan menganalisis laporan-laporan yang masuk dari tingkatan kecamatan, kabupaten, propinsi dan pusat.
2. Pengertian evaluasi adalah menganalisis hasil pencapaian program yang dapat dilakukan pada pertengahan tahun dan akhir tahun.
3. Hasil dari monitoring dan evaluasi ini menjadi umpan balik bagi perencanaan dan proses pengambilan keputusan apabila terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya
4. Monitoring dan evaluasi terutama akan difokuskan pada pencapaian kinerja input, output, outcome dari setiap kegiatan operasional.

## B. Pelaporan

1. Pelaporan dilakukan melalui sistem informasi PSDS yang berbasis web (*on line)*
2. Pelaporan dilakukan setiap bulan sehingga di setiap kabupaten/kota perlu dilengkapi dengan tenaga administrasi dan incoder terlatih.
3. Selain dilaporkan secara *on line*, pelaporan pelaksanaan kegiatan secara hirarki dilaporkan setiap bulannya dengan mekanisme sebagai berikut :
    a. Hasil rekapitulasi pelaksanaan kegiatan tingkat kecamatan oleh koordinator satgas secara regular mingguan dilaporkan kepada Unit Managemen Kabupaten/Kota melalui Kepala Dinas Peternakan.
    b. Hasil rekapitulasi pelaksanaan kegiatan di tingkat koordinator satgas, oleh Kepala Dinas Peternakan Kabupaten/Kota disampaikan ke Unit Managemen Provinsi melalui Kepala Dinas Peternakan.
    c. Hasil rekapitulasi pelaksanaan kegiatan di kabupaten/kota di propinsi dilaporkan ke Unit Managemen Pusat melalui Direktur Jenderal Peternakan
    d. Laporan pelaksanaan kegiatan PSDS nasional akan dilaporkan ke Menteri Pertanian secara periodik setiap bulan untuk menjadi bahan pertimbangan rapat sidang kabinet.

## C. Forum Koordinasi

1. Forum koordinasi merupakan salah satu alat monitoring dan evaluasi untuk melihat berbagai permasalahan yang timbul di lapangan dan dicarikan solusinya. Forum koordinasi juga dapat memberikan pertimbangan-pertimbangan penting untuk perencanaan untuk tahun berikutnya, baik yang menyangkut target dan sasaran, ketenagakerjaan, pembiayaan dan hal-hal lainnya sesuai dengan kebutuhan setempat.
2. Forum koordinasi tersebut di tingkat pusat berbentuk tim teknis yang beranggotakan unsur-unsur struktural yang diketuai oleh Direktur Jenderal Peternakan. Sedangkan di tingkat propinsi berupa tim teknis yang beranggotakan unsur-unsur Dinas propinsi terkait.
3. Forum koordinasi di tingkat kabupaten dapat dibentuk tim teknis yang diketuai oleh dinas yang menangani fungsi pembangunan peternakan dan kesehatan hewan.
4. Forum koordinasi ini sesuai dengan tingkatannya dapat memberi arahan kepada unit managemen masing-masing berdasarkan pertemuan regular yang diadakan setiap 2 bulan.
5. Secara nasional, Direktur Jenderal Peternakan akan mengundang forum koordinasi di tingkat propinsi atau kabupaten/kota untuk membahas dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan swasembada daging sapi secara umum dan forum koordinasi tersebut memberikan saran-saran dan solusi permasalahan yang ada.
6. Di tingkat propinsi dan kabupaten dilakukan langkah serupa dengan tingkat nasional, akan tetapi frekuensi pertemuan tersebut akan diatur setahun minimal 3 kali di luar pertemuan-pertemuan yang dianggap perlu oleh masing-masing propinsi kabupaten/kota.

# BAB XII
# PEMBIAYAAN

Sumber dana Program Swasembada Daging Sapi Tahun 2014 diharapkan berasal dari pemerintah (APBN dan APBD), swasta dan masyarakat. Pembiayaan yang bersumber dari APBN, disajikan pada Tabel 7.

Tabel 7. Rincian biaya program swasembada daging sapi 2014.

| No | Kegiatan Operasional | Dana (Rp. Juta) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| | | | | | | |
| | | 3,541,830 | 3,333,180 | 3,433,830 | 3,487,180 | 3,598,530 |
| 1 | Pengembangan usaha pembiakan dan penggemukan sapi lokal | 865,000 | 790,000 | 775,000 | 760,000 | 745,000 |
| 2 | Pengembangan pupuk organik dan biogas | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 |
| 3 | Pengembangan integrasi ternak sapi dan tanaman | 4,400 | 8,800 | 13,200 | 17,600 | 22,000 |
| 4 | Pemberdayaan dan peningkatan kualitas RPH | 20,000 | 60,000 | 70,000 | 40,000 | 60,000 |
| 5 | Optimalisasi IB dan INKA | 142,500 | 152,500 | 168,500 | 181,500 | 195,000 |
| 6 | Penyediaan dan pengembangan pakan dan air | 78,630 | 78,680 | 79,330 | 80,280 | 81,030 |
| 7 | Penanggulangan gangguan reproduksi dan peningkatan pelayanan kesehatan hewan | 75,000 | 78,600 | 82,500 | 86,700 | 91,400 |
| 8 | Penguatan wilayah sumber bibit dan kelembagaan usaha pembibitan | 79,000 | 90,000 | 101,000 | 107,000 | 120,000 |
| 9 | Penyelamatan sapi betina produktif | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 |
| 10 | Pengembangan pembibitan sapi potong melalui VBC | 200,000 | 250,000 | 300,000 | 350,000 | 400,000 |
| 11 | Penyediaan bibit melalui subsidi bunga (Program KUPS) | 14,000 | 30,000 | 50,000 | 70,000 | 90,000 |
| 12 | Pengaturan stock sapi bakalan dan daging | 500 | 1,000 | 700 | 500 | 500 |
| 13 | Pengaturan distribusi dan pemasaran ternak sapi dan daging | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 14 | Operasional kegiatan pusat/ prop/kab/kota/Kecamatan | 472,600 | 203,400 | 203,400 | 203,400 | 203,400 |
| | ***Total Most Likely*** | | | | | **17,394,550** |

# BAB XIII
# PENUTUP

Program Swasembada Daging Sapi 2014 merupakan tugas seluruh lapisan masyarakat untuk mewujudkannya. Program swasembada daging ini memiliki nilai strategis guna meningkatkan asupan nutrisi pangan terutama yang bersumber dari protein hewani, dan memberikan kontribusi nyata terhadap ketahanan pangan.

Sebagai panduan untuk melaksanakan program tersebut telah disusun Pedoman Umum Program Swasembada Daging Sapi yang memuat : (i) prinsip-prinsip swasembada daging; (ii) ruang lingkup; (iii) Road map; (iv) kontribusi kegiatan dalam penyediaan daging; (v) strategi; (vi) kegiatan prioritas; (vii) rencana aksi; (viii) organisasi pelaksana; (ix) pembiayaan; (x) monitoring dan evaluasi.

Diharapakan pedoman umum ini dapat dijadikan sebagai acuan bagi para pelaksana di tingkat pusat, propinsi dan kabupaten/kota dalam rangka implementasi PSDS 2014. Selanjutnya pedoman umum ini akan dijabarkan lebih lanjut ke dalam pedoman teknis. Sedangkan ketentuan-ketentuan yang belum termuat dalam pedoman umum dan pedoman teknis dapat diatur sesuai dengan kondisi spesifik wilayah dalam kerangka pencapaian PSDS 2014.

**Jakarta, Februari 2010**
**Menteri Pertanian**

**ttd**

**Suswono**